

**PERAN MODIN SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)
PERSPEKTIF TEORI UTILITY JEREMY BENTHAM.
(Studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)**

TESIS

OLEH :

Muchammad Iqbalul Fauzi

NIM: 16781016



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**PERAN MODIN SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)
PERSPEKTIF TEORI UTILITY JEREMY BENTHAM.
(Studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)**

TESIS

Diajukan kepada :

Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)
Konsentrasi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Muchammad Iqbalul Fauzi
NIM: 16781016

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Iqbalul Fauzi

NIM : 16781016

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakshhiyyah

Alamat : Ds Sugihwaras RT 16 RW 04 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Judul Penelitian : Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi kasus KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pikewenangan lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 26 Desember 2020

 Hormat saya,

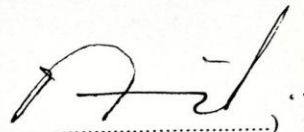
Muchammad Iqbalul Fauzi
16781016

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi kasus KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 21 Januari 2021

Dewan penguji,


1. Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001


(.....)
(Ketua)


2. Prof. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003


(.....)
(Penguji Utama)

3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001


(.....)
(Pembimbing 1/Penguji)

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
197306031999031001


(.....)
(Pembimbing 2/ Sekretaris)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

KATA PENGANTAR

Al-ḥamd li Allāh rabb al-‘ālamīn. Syukur tiada tara kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan, sehingga proses penyelesaian tesis dengan judul “*Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi kasus KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)*” bisa berjalan dengan cukup lancar.

Ṣalla Allah wa sallam ‘alā sayyidinā Muḥammad. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia pada Islam. Ajaran mulia yang tak lekang oleh masa, hingga kita juga bisa ikut merasakan nikmatnya.

Merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis, dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, mampu menyelesaikan salah satu kewajiban untuk meraih gelar Magister (S-2) al-Ahwal al-Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulisan tesis ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pikewenangan. Untuk itu, lewat kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag dan para pembantu Rektor.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

3. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah sekaligus pembimbing II, Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.. atas dukungan, koreksi dan kemudahan komunikasi hingga tugas akhir ini bisa selesai tepat waktu.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag yang sudah banyak memberikan saran, bantuan, serta pencerahan selama penulisan tesis.
5. Seluruh pengajar, bapak maupun ibu dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas keikhlasannya dalam mengajar dan membagi wawasan keilmuan.
6. Ibu dan Ayah tercinta atas segala doa, dukungan moril maupun materiil, serta usaha yang tak kenal letih demi memperjuangkan pendidikan penulis. Untuk merekalah karya ini didedikasikan.
7. Seluruh teman dan pikewenangan yang ikut membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Tak ada gading yang tak retak, begitupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis tetap berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Batu, 26 Desember 2020

Penulis

PERSEMBAHAN

Tugas akhir strata dua (S2) pasca sarjana ini akan dipersembahkan untuk dunia keilmuan dan orang-orang yang memberikan perhatian di dalamnya, terkhusus kepada para pengabdian pendaftaran pencatatan nikah.

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Paling baiknya manusia adalah ia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia”

ABSTRAK

Muchammad Iqbalul Fauzi 2016. “Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi kasus KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)” Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. (II) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: *Peran, Modin, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Teori Utility Jeremy Bentham.*

Pasca terbitnya surat instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) mulai dibatasi. hanya KUA yang masuk dalam tipologi D1 dan D2 saja yang diperbolehkan memiliki Pembantu PPN. Sementara fakta di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengurus sendiri pendaftaran pencatatan nikah, termasuk di wilayah KUA kecamatan Candi dengan jumlah peristiwa nikah dan rujuknya di atas 100 peristiwa per bulan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Candi, dan (2) menganalisis Peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Candi pasca intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015 Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh melalui proses penggalian data yang dilakukan dengan metode wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan; (1) Peran modin sebagai pembantu PPN di kecamatan Candi ini sangat penting untuk membantu peran KUA Candi dalam rangka optimalisasi pelayanan, (2) ada empat aspek kebahagiaan yang dirasakan dari peran modin sebagai P3N, *pertama*, keluarga yang bahagia, kekal dan memiliki kekuatan hukum bisa dirasakan dalam waktu yang lama, *kedua*, kepastian pelaksanaan pencatatan pernikahan, *ketiga*, peluang untuk pencatatan pernikahan semakin besar dan keempat, manfaat modin sebagai P3N bisa dirasakan oleh banyak pihak, yaitu masyarakat, kepala desa dan petugas pencatat nikah di KUA.

ABSTRACT

Muchammad Iqbalul Fauzi 2016. "The Role of Modin as Assistant for Marriage Registration Officer (P3N) in perspective of utility theory of Jeremy Bentham (Case study in religious Affairs office (KUA) of Candi District, Sidoarjo Regency)". Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study, Program of Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: (1) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. (II) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: *Role, Modin, Marriage Registration Officer (PPN), Utility Theory of Jeremy Bentham.*

After the issuance of the instruction letter of Director General of Community Guidance of Ministry of Religion Number Dj.II/1 year 2015 about Appointment of Marriage Registration Officer, the Appointment of Assistant for Marriage Registration Officer (P3N) has been restricted. KUA cannot have Assistant for PPN, except for KUA with typology D1 and D2. But, in the fact, Many people cannot take care of their own marriage registration including in the KUA area of Candi sub-district, there are more than a hundred of marriage and *rujuk* cases in one month.

This research aims (1) to Understand the role of modin as Assistant for Marriage Registration Officer (PPN) in the candi Sub-district, (2) to analysis the role of modin as Assistant for Marriage Registration Officer (P3N) After the issuance of the instruction letter Number Dj.II/1 year 2015 in the perspective of theory utility of Jeremy Bentham

This research has been classified into field research. Used data is primary. The process of gathering data use interview method. The data has been analyzed by descriptive qualitative method.

The result of research shows: (1) The Role of Modin as Assistant for Marriage Registration Officer (P3N) in area of Candi sub-district is very important to helps religious Affairs office (KUA) of Candi for optimize the service. (2) four aspects of heppines in the role of Modin as Assistant for Marriage Registration Officer (P3N) are, *the first*, the people enjoys a happy family that has the force of law for a long time, *the second*, certainty of the implementation of marriage registration, *the third*, the opportunity for marriage registration is getting bigger and *the fourth*, many people gets benefits of the role of Modin as Assistant for Marriage Registration Officer (P3N), theya are public, village master, and Marriage Registration Officer (P3N) of religious Affairs office (KUA)

فكرة تجريدية

محمد إقبال فوزي: دور مودين في مساعدة موظف تسجيل الزواج (P3N) عند نظرية منفعة من جيريمي بينتهام (دراسة التجريدية في مكتب الشؤون الديني (KUA) في منطقة جاندي. بحث علمي لقسم الأحوال الشخصية من كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف الأول: د. إشراق النجاح الحج، والثاني: د. زين المحمود

الكلمات الرئيسية: دور، موظف تسجيل الزواج (PPN)، عند نظرية منفعة من جيريمي بينتهام

حدثت وزارة الشؤون الديني تعيينا لمساعد موظف تسجيل الزواج (P3N) في مكتب الشؤون الديني (KUA)، بعد أن يصدر المدير العام في الإرشاد المجتمعي من وزارة الشؤون الديني خطاب تعليمات عن تعيين موظف تسجيل الزواج (PPN) رقم Dj.II/1 سنة 2015. إلا أن ذلك المكتب نوع من أنواع المكتب من جنس D1 أو D2. والعشب يحتاج من يساعدهم في تسجيل الزواج في ذلك المكتب، وكذلك العشب في منطقة جاندي، وفيها أكثر من مئة أمورا في شهر واحد، نكاحا كانت أو رجوعا.

ويهدف هذا البحث ل: 1. فهم دور مودين في مساعدة موظف تسجيل الزواج (P3N)، و 2، تحليل ذلك الدور بعد أن يصدر المدير العام في الإرشاد المجتمعي من وزارة الشؤون الديني خطاب تعليمات عن تعيين موظف تسجيل الزواج (P3N) رقم Dj.II/1 سنة 2015 عند نظرية منفعة من جيريمي بينتهام.

واعتبر هذا البحث من أنواع الدراسة التجريبية. وأما البيانات المستخدمة فهي البيانات الأساسية التي أخذها الباحث بطريقة المقابلة. وتحليل البيانات بطريقة الوصفي الكيفي.

وأما نتائج هذا البحث فتشير (1) أن دور مودين مهم جدا في أن يساعد موظف تسجيل الزواج (P3N) في مكتب الشؤون الديني (KUA) في منطقة جاندي. وهو يساعد الموظف في تحسين الخدمة، (2) باعتبار هذا الدور، أعطى مودينا أربع فرحات، الأولى يحصل الشعب عائلة سعيدة فيها صفة توافق القانون طوال الوقت، الثانية: كون التسجيل في النكاح قطعية، الثالثة قد ازداد إمكان التسجيل، والرابعة يحصل منفعة هذه الدور كثير من الناس منهم الشعب في القرية لاسيما من لا يفهم طرييقة التسجيل أو للا وقت له فيه و رئيس القرية و موظف تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الديني

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	5
F. Definisi Operasional	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pernikahan secara Umum	17
1. Dasar Hukum Pernikahan	21
2. Syarat dan Rukun Pernikahan	25
3. Hukum Pernikahan	29
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	31
B. Pencatatan Pernikahan	36
C. Pelaksanaan Pernikahan	42
D. Modin	50
1. Sejarah dan Pengertian Modin	50
2. Tugas dan Posisi Modin dalam Pemerintah Desa.....	54
E. Pembantu pengawai Pencatat Nikah (PPN)	58

1. Pengertian Pembantu PPN	58
2. Tugas Pembantu PPN.....	60
F. Teori Utiliti Jeremy Bentham.....	63
1. Biografi Jeremy Bentham	63
2. Pemikiran Utiliti Jeremy Bentham	65
3. Kerangka Berfikir.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	75
B. Kehadiran Peneliti	76
C. Latar Penelitian	76
D. Data dan Sumber Data Penelitian	77
E. Teknik Pengumpulan Data	78
F. Teknik Analisis Data	79
G. Pengecekan Keabsahan Data	81
BAB IV KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO	
A. Profil Kecamatan Candi	82
B. Profil dan Struktur KUA kecamatan Candi	83
BAB V ANALISIS TERHADAP PERAN MODIN SEBAGAI PEMBANTU PPN PASCA INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ. II/1 TAHUN 2015	
A. Peran Modin Sebagai Pembantu PPN di KUA kecamatan Candi	87
B. Peran Modin Sebagai Pembantu PPN di KUA Kecamatan Candi Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015 dalam Pandangan Teori Utility Jeremy Banthem.....	94
BAB VI	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

TRANSLITERASI

A. Umum dan Konsonan

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi. Dalam tesis ini, penulis menggunakan sistem transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan tesis, disertasi dan makalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	T
ت	=	T	ظ	=	D
ث	=	Th	ع	=	((')koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	S	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah “i”, dammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang, masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	اَ	a	اَيَ	Ay
اِ	I	اِ	ī	اَوَ	Aw
اُ	U	اُ	ū	اُأَ	ba'

Vokal (a) panjang =	ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دون	Menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) =	اوَ	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	اَيَ	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata, tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir huruf tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti, khawārīq al-‘āda, bukan khawārīqu al-‘ādati, bukan khawārīqul ‘ādat; inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām, bukan inna al-dīna Allāhi al-Islāmu, bukan innad dīna ‘indalAllāhil-Islāmu dan seterusnya.

C. Ta' Marbūṭah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risālat li al-mdarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi fī raḥmatillāh, dan lain sebagainya.

D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iẓafah) maka dihilangkan. Sebagaimana contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan.....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masha' Allāh kāna wa mā lam yasha' lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab, harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Sebagaimana nama Abdurrahman Wahid (Presiden RI keempat) tidak ditulis dengan menggunakan ‘Abd al-Raḥmān Wāḥid dan lain sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, Menteri Agama membentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang biasa dijabat dengan Modin.¹ Tugas dari petugas P3N adalah melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam dan membantu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan yang berkaitandengan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam lainnya. Hal ini juga dimaksudkan agar pemerintah bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 ayat 4 misalnya, disebutkan bahwa Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota untuk membantu tugas-tugas P3N di desa.² Pengangkatan ini dimaksudkan untuk pemerataan pelayanan terutama mengenai pelayanan pernikahan dalam masyarakat yang banyak sekali jumlah penduduknya serta jauh dari KUA sehingga sulit dijangkau oleh PPN apabila ada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan.

¹ Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 Tahun 2003 tentang pencatatan Nikah.

² Pasal 1 ayat 4 PMA Nomor 11 tahun 2007.

Modin merupakan tokoh atau perangkat di lingkungan pemerintah desa yang kapasitas keilmuannya dalam bidang agama diakui oleh masyarakat. Disamping juga merupakan sosok yang dihormati oleh masyarakat setempat. Sehingga, dalam setiap urusan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan rujuk selalu melibatkan peran modin.

Selanjutnya, agar fungsi P3N tepat guna, pada tanggal 26 Januari 2015, Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Instruksi Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Instruksi Kementerian Agama memerintahkan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi se-Indonesia agar; *pertama* selektif dalam melakukan pengangkatan Pembantu P3N. Rekomendasi pengangkatan Pembantu P3N harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. *Kedua*, pengangkatan Pembantu P3N juga harus dilakukan dengan didasarkan pada kebutuhan, yaitu wilayah kecamatan memang tidak bisa dijangkau oleh Petugas Pencatat Nikah dan terbatasnya SDM dibanding luas wilayah.

Tipologi KUA adalah klasifikasi KUA kecamatan yang ditentukan berdasarkan jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, serta kondisi geografis. Tipologi A adalah KUA yang jumlah nikah dan rujuknya di atas 100 peristiwa per bulan. Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan. Sedangkan tipologi C adalah KUA dengan jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan.

Selain itu, ada juga KUA tipologi D1, yaitu KUA yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan. Terakhir tipologi D2, yaitu KUA kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.³

Dengan adanya Surat Instruksi Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tersebut, ada perubahan besar dalam sistem pengangkatan pembantu P3N. Tidak semua KUA bisa memiliki Pembantu P3N. Hanya KUA yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan (tipologi D1) atau perbatasan kepulauan (tipologi D2).

Salah satu KUA yang terdampak perubahan berdasarkan surat instruksi tersebut adalah KUA Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan tipologi KUA, KUA Kecamatan Candi termasuk dalam tipologi A karena jumlah nikah dan rujuknya di atas 100 peristiwa per bulan. Berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tersebut, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sudah tidak aktif lagi.

Padahal, jumlah PPN yang hanya ada dua orang di setiap KUA menjadikan peran P3N di lingkungan KUA kecamatan Candi sangat terasa. Kepala KUA Kecamatan Candi merasa terbantu dengan adanya P3N yang membantu proses pengurusan nikah atau rujuk. Setidaknya, jumlah berkas peristiwa yang masuk tidak menumpuk dan menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan.

³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Eksistensi P3N yang berasal dari tokoh masyarakat dan berbaur dengan masyarakat secara langsung lebih mengetahui latar belakang masyarakat di wilayahnya. Peristiwa nikah misalnya sangat berkaitan dengan kejelasan status calon pengantin maupun wali. Petugas KUA merasa kesulitan dalam berinteraksi mencari informasi lebih dalam dari pihak yang bersangkutan, terlebih calon pengantin dan wali tidak hadir ketika proses *rafa*'.

Realitas yang digambarkan penulis di atas membuktikan bahwa keberadaan P3N masih sangat dibutuhkan, sekalipun pada level KUA yang tidak masuk tipologi D1 atau D2. Di tambah lagi, bila jumlah peristiwa nikah dan rujuknya sangat tinggi. Dengan demikian, penulis menganalisis instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dengan kaca mata kebermanfaatan hukum, kaitannya dengan ada tidaknya P3N di semua KUA, terkhusus di KUA dengan jumlah peristiwa nikah dan rujuk yang cukup tinggi.

Sejatinya, hukum haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang P3N, haruslah berdasar pada manfaat bagi masyarakat. Hal demikian selaras dengan pemikiran Jeremy Bentham, bahwa hukum haruslah berangkat dari moralitas dan moralitas itu sendiri bertumpu pada kebermanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Melalui teorinya, teori utility, Bentham sampai pada kesimpulan bahwa hukum haruslah

mampu mewujudkan : *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).⁴

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Candi ?
2. Bagaimana peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Candi pasca Intruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 perspektif Teori Utility Jeremy Bentham?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Memahami bagaimana peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Candi
- 2) Menganalisis Peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Candi pasca intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015 Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan member manfaat teoretis dan praktis:

1. Secara Teoretik

⁴ Jeremy Bentham, A New Survey Of Universal Knowledge :Encyclopaedia Britannica, Vol. 3 486.

- a. Dapat mengembangkan wacana keilmuan yang berkaitan dengan hukum keluarga islam terutama mengenai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- b. Sebagai referensi baru bagi penelitian selanjutnya yang bertema serupa.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai rujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelayanan perkawinan.
- b. Sebagai masukan baru dan bahan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai peraturan pelayanan nikah.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis akan memaparkan beberapa karya tulis yang dihasilkan dari beberapa penelitian khususnya yang berkaitan dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Serta memaparkan dan membuktikan beberapa aspek mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, Sehingga nantinya diharapkan para pembaca dapat mengetahui orisinalitas dalam penelitian ini.

1. Ahmad Syaifudin Dengan Judul “Pelaksanaan Tugas Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah (studi di KUA kecamatan dau kabupaten Malang) 2008”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya berkaitan dengan kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan tugas P3N dengan KMA Nomor 477 Tahun 2004

Tentang Pencatatan Nikah.⁵ Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ditemukan banyak kendala dalam pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah karena di pengaruhi oleh Kedudukan P3N yang merangkap jabatannya, Sedikitnya pegawai yang ada di KUA, budaya yang ada di masyarakat, P3N yang statusnya non PNS, dan juga adanya ketidak fahaman terhadap penjelasan pasal.

2. Mazyatul Hikmah dengan judul “ Penundaan perkawinan bagi wanita hamil (studi pandangan dan ulama dan pakar hukum terhadap kebijakan KUA junrejo kota Batu)”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai kewenangan KUA dalam penundaan perkawinan bagi wanita hamil.⁶
3. Ali Ahmadi dengan judul “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) 2015. Jenis penelitian ini yaiu penelitian lapangan yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan objek yang di teliti.⁷ Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa penghulu megabulkan pernikahan hamil oleh yang tidak menghamili. Hal tersebut mengacu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al Syafi’i yang berpendapat bahwa pernikahannya dipandang sah, dan juga terdapat tiga alasan lain untuk mengabulkan yaitu.

⁵Ahmad Syaifudin, Tesis, *Pelaksanaan Tugas Pegawai peencatat nikah dan Pembantu Pegawai pencatat Nikah Menurut keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah (Studi di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*, (Malang : Universitan Muhammadiyah Malang, 2008).

⁶Mazyatu Hikmah. Tesis.*Penundaan perkawinan bagi wanita hamil (studi pandangan dan ulama dan pakar hukum terhadap kebijakan KUA junrejokotaBatu)*Malang 2013.

⁷Ali Ahmadi. Tesis .‘ *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)* semarang 2015.

Pertama, Syarat dan rukun nikah terpenuhi. Kedua, Tidak ada unsur paksaan kedua belah pihak, dan Atas dasar menutup aib.

4. Ismail (2015) dengan judul penelitian “Potret Kinerja dan Pelayanan Publik Oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kabupaten Tangerang: Kasus KUA Kecamatan Cikupa, Curug, Teluk Naga, dan Kosambi”. Penelitian tersebut memotret kinerja dan pelayanan publik yang dilakukan oleh P3N di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan P3N di Kabupaten Tangerang masih dibutuhkan, kinerjanya sudah cukup baik, namun pelayanan yang diberikan belum memenuhi standar pelayanan publik. Sedangkan honorarium yang belum jelas menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh Pembantu P3N, namun hal tersebut ditutupi dengan kepercayaan masyarakat yang masih besar terhadap mereka, sehingga menimbulkan motivasi, iklim kerja yang kondusif dan harmonis.⁸
5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yodhi Ibrahim dengan judul “Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pelaksanaan Perkawinan”. Jurnal

⁸Ismail, Potret Kinerja dan Pelayanan Publik Oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kabupaten Tangerang: Kasus KUA Kecamatan Cikupa, Curug, Teluk Naga, dan Kosambi, *Jurnal Penamas* Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, 493.

tersebut membahas mengenai tidak optimalnya Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan Nikah.⁹

6. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta pada tahun 2014 mengenai kinerja P3N di 11 wilayah Kerja Indonesia Bagian Barat, minus Aceh.¹⁰ Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan antara keduanya ada pada subyek penelitian, keduanya sama-sama menjadikan P3N sebagai subyek penelitian. Perbedaannya ada pada fokus penelitian. Dalam penelitian BLA membahas mengenai kinerja P3N di beberapa tempat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang kedudukan Modin sebagai P3N setelah adanya intruksi Dirjen Bimas Islam. Selain itu perbedaannya ada pada locus penelitian, BLA mengambil 11 wilayah untuk diteliti sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada satu wilayah yaitu KUA kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
7. Ilmiati dan Uswatun Hasanah mengenai : Kedudukan dan Peran P3N Dalam Urusan Pernikahan (studi kasus di wilayah KUA kecamatan Palu Selatan Kota Palu).¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membahas mengenai pencatatan pernikahan dimana P3N sangat berpengaruh besar dalam membantu tugas P3N. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada tema pembahasan mengenai P3N. Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitiannya,

⁹Muhammad Yodhi Ibrahim, Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pelaksanaan Perkawinan, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, April 2015.

¹⁰ Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, *Seminar Hasil Penelitian: Kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, <http://blajakarta.kemenag.go.id>, (diakses tanggal 21 november 2019)

¹¹ Istiqra, "Jurnal Penelitian Ilmiah", Vol. 5 No, 1, Juni 2017 LP2M Palu.

penelitian ini menjadikan peran P3N dalam membantu tugas P3N. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada kedudukan Modin sebagai P3N setelah adanya Intruksi Dirjen Bimas Islam. Selain itu terdapat perbedaan dalam hal locus penelitian, penelitian ini dilakukan di Palu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di wilayah KUA kecamatan Candi.

8. Hanif Hanani dengan Judul : Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam penyelesaian sengketa pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adhal di KUA kecamatan Muntilan), 2009.¹² Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membahas mengenai peranan pejabat pernikahan (P3N) dalam menyelesaikan sengketa wali adhal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pejabat yang mengurus hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai kedudukan Modin Sebagai P3N.
9. Syamsul Bahri, mengenai : Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membahas mengenai pencatatan pernikahan yang didalamnya mengulas tentang beberapa hal yaitu, pencatatan pernikahan, talak, cerai dan rujuk, selain itu juga membahas tugas-petugas yang mendapatkan amanah dalam pengurusan semua

¹² Hanif Hafani, *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam penyelesaian sengketa pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adhal di KUA kecamatan Muntilan)*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

¹³ Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, Thesis (Medan : Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2012).

hal tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pencatatan pernikahan. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai kedudukan Modin sebagai P3N.

10. Abu Yazid Al- Bustomi dengan Judul : Hasil Tes Kehamilan Sebagai Persyaratan Izin Nikah Perspektif Kontruksi Sosial (Studi kasus di kecamatan Temas),2017.¹⁴
- Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis empiris yang membahas mengenai kebijakan P3N (menjadikan tes kehamilan sebagai persyaratan pra nikah). Penelitian ini memiliki persamaan yang berhubungan dengan Modin sebagai P3N. Namun, fokus penelitian ini lebih mengenai kebijakan modin (P3N) sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada kedudukan Modin sebagai P3N.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut diatas antara lain:

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Ahmad Syaifudin/ 2008.	Pelaksanaan tugas PPN dan p3n Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 (studi di KUA kecamatan	Berkaitan dengan pencatat nikah	Efektifitas kinerja PPN dan P3N berdasarkan KMA.	Objek kajian tentang Peran Modin sebagai P3N perspektif teori Utility

¹⁴ Abu Yazid al- Bustomi, Tesis, *hasil Tes kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah Perspektif Kontruksi Sosial(Studi Kasusdi Kecamatan temas)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

		dau kabupaten Malang)			
2	MaziyatulH ikmah / 2013.	Penundaan perkawinan bagi wanita Hamil (Studi pandangan ulama dan pakar hokum terhadap kebijakan KUA Junrejo kota Batu)	Berkaitan dengan kebijakan KUA	Berkaitan dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.	Objek kajian lebih berfokus pada P3N.
3.	Ali Ahmadi/ 2015.	Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah	Berkaitan dengan problematika pernikahan serta pencatatan nikah.	faktor-faktor pendukung dan penghambat pegawai pencatat nikah (PPN)	Objek kajian tentang Peran Modin sebagai P3N
4.	Ismail/ 2015.	Potret Kinerja dan Pelayanan Publik Oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikahdi Kabupaten Tangerang	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.	Memotret kinerja dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pembantu PPN di Kabupaten Tangerang	Objek kajian tentang Peran Modin sebagai P3N perspektif teori Utility
5.	Muhammad Yodhi Ibrahim/	Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah	Peranan Pegawai Pencatat Nikah	Tidak Optimalnya Peran Pegawai	Objek kajian tentang Peran Modin

	2015.	Dalam Pelaksanaan Perkawinan		Pencatat Nikah.	sebagai P3N perspektif teori Utility
6.	Balai Penelitian dan pengembangan Agama Jakarta/ 2014	Kinerja P3N di 11 wilayah Kerja Indonesia Bagian Barat, minus Aceh.	Subyek penelitiannya P3N	Kinerja P3N dalam menjalankan tugasnya	Objek kajian tentang Peran Modin sebagai P3N
7	Ilmiati dan Uswatun Hasanah/ 2017	Kedudukan dan Peran P3N Dalam Urusan Pernikahan (studi kasus di wilayah KUA kecamatan Palu Selatan Kota Palu).	Berkaitan dengan P3N	Tugas P3N dalam membantu PPN	Objek kajian tentang Peran Modin sebagai P3N perspektif teori Utility
8.	Hanif Hanani/ 2009	Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam penyelesaian sengketa pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adhal di KUA	Berkaitan dengan pejabat yang mengurus berkas Pernikahan	Peranan PPN dalam menyelesaikan sengketa wali adhal	Objek kajian tentang Peran Modin sebagai P3N perspektif teori Utility

		kecamatan Muntilan)			
9.	Syamsul Bahri / 2012	Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan	Membahas mengenai Pencatatan Perkawinan	Fokus penelitiannya mengenai Pencatatan Perkawinan	Objek kajian tentang Peran Modin sebagai P3N
10.	Abu Yazid Al-Bustomi/ 2017	Hasil Tes Kehamilan Sebagai Persyaratan Izin Nikah Perspektif Kontruksi Sosial (Studi kasus di kecamatan Temas)	Membahas mengenai keberadaan Modin sebagai P3N	Fokus penelitiannya mengenai kebijakan Modin (P3N)	Objek kajian tentang Peran Modin sebagai P3N

Tabel 1.1 Perbedaan, Persamaan dan Orisinalitas Penelitian

F. Definisi Operasional

Maksud dari Definisi Operasional disini adalah penjelasan mengenai Variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 Variabel yaitu: “Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai pencatat Nikah (P3N)” sebagai Variabel Terikat. “ Teori Utility Jeremy Bentham” Sebagai Variabel Bebas.

1. Modin adalah Pemuka Agama Islam di Desa yang mempunyai wawasan yg baik dalam hal keagamaan dan mempunyai peran dalam mengurus masalah keagamaan terutama pernikahan dan kematian.
2. Teori Utility Jaremu Bentham Adalah teori yang mendasarkan moralitas hukum kepada kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari VI bab berisi beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri atas: Konteks penelitian, Fokus Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian pustaka yang terdiri dari: kajian konseptual yang berkaitan dengan penelitian seperti kajian tentang pencatatan perkawinan, petugas pembantu pegawai pencatat nikah dan landasan teoritik yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini, yaitu teori Utility Jeremy Bentham.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas paparan data dan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum latar belakang penelitian.

Bab V dijelaskan tentang hasil penelitian yang berisi analisa hasil penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini setelah melalui proses analisa data.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bisa diberikan oleh peneliti dalam rangka perbaikan peraturan perundangan ke depan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan secara Umum

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau juga sering disebut pernikahan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan pernikahan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan,¹⁵ sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹⁶

¹⁵H.S. A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya berupa pernikahan. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, yang dengan upacara akad nikah sebagai lambang adanya rasa saling rela, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.¹⁷

Pernikahan dalam literatur fiqih disebut dengan dua kata yaitu *nakaha* dan *zawaja*, yang mana dua kata ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadiS Nabi. Kata *nakaha* terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.¹⁸

Demikian pula dengan kata *zawaja* terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 442.

¹⁷ Muhammmad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), 1.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.¹⁹

Secara arti kata نکح atau زواج berarti “bergabung” (ضم), ”hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Sedangkan secara syari’at sebagaimana dalam kitab fiqh nikah diartikan sebagai:

و شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ²⁰

Artinya: “Akad suatu perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij.”

Penggunaan lafal akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Pernikahan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.²¹ Sedangkan ungkapan يتضمن اباحة وطء yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal yang membolehkannya secara hukum syara’, yang dalam hal ini adalah dengan adanya

¹⁹ Ibid., 423.

²⁰ Zainuddin Ibn ‘Abdul ‘Aziz al-Malibariy, *Fathu al-Mu’in bi Syarhi Qurratu al-’Aini*, (Surabaya: Nurul Huda, tt.), 99.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 74.

akad nikah antara keduanya. Sedangkan kata *بلفظ انكاح او تزويج*, berarti bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja*, oleh karena dalam awal Islam di samping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut “perbudakan”.²²

Ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah akad. Mereka mengatakan dengan alasan bahwa Allah mengharamkan pernikahan karena ada hubungan pernikahan (مصاهرة) penghormatan baginya sebagaimana keharaman karena nasab (النسب). Sedangkan ulama’ Hanafiyah menyatakan bahwa nikah pada hakikatnya adalah الوطء (hubungan intim), dan akad merupakan makna majas.²³

Adapun pengertian lain dari nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ بِالْآخِرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ²⁴ اسْتِمْتَاعٌ كُلُّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ

Artinya: Nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya istimta’ (saling menikmati) antara kedua orang yang melangsungkan akad sesuai dengan syariat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dinyatakan, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, , 2007), 38.

²³ Muhammad Ali as-Sabuni. *Rowa’ihu al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*, Jilid I, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), 360.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiah*, (Dar al-Fikr al-‘Arabi, , 1957), 18.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, “pernikahan yang sah menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *misthaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁶

Dari beberapa definisi di atas, tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Semua merujuk pada satu pengertian yang sama, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak, dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk menghalalkan percampuran atau hubungan kelamin antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan, menjadi sekutu dan teman hidup dalam rumah tangga.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan merupakan sunnah Rasulullah. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini adalah:

a. Surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

²⁵ Cemerlang, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia...*, 2.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”²⁷

b. Surat an-Nisa’ ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (ain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁸

c. Surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢١)

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

²⁸ Ibid., 77 .

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁹

d. Surat an-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”³⁰

Selain ayat-ayat al-Qur'an juga terdapat hadist-hadist Nabi yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah dan juga tentang larangan untuk membujang. Diantaranya adalah:

a. Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)³¹

²⁹Ibid., 406.

³⁰Ibid., 274.

³¹Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhori, *Sahih Bukhori*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 117.

Artinya: Dari ‘Abdillah Ibn Yazid berkata Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.” (HR.Bukhori)

b. Hadis Nabi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)³²

Artinya: Dari Aisyah berkata : “Rasulullah bersabda, pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu.” (HR.Ibnu Majah)

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan, apabila syaratnya terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat pernikahan itu ada dua, yaitu:

³²Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 152-153.

1. Halalnya seorang perempuan bagi laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maka disyaratkan perempuan itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, dengan sebab apapun yang menjadikan keharaman untuk melaksanakan pernikahan di antara mereka, baik bersifat sementara atau untuk selamanya.³³
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Juhum ulama telah bersepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari lima, yaitu:

1. Calon suami, dengan syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas orangnya dan jelas bahwa dia adalah seorang laki-laki,
 - c. Bukan merupakan mahram bagi calon istri,
 - d. Melakukan pernikahan atas kemauan sendiri bukan karena terpaksa,
 - e. Tidak sedang melakukan ihram, sebagaimana hadis Nabi:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. (رواه مسلم)³⁴

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 479.

³⁴ Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaji al-Qushairi an-Naysaburiy, *Sahih Muslim, Jus V* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 37.

Artinya: Dari ‘Ustman ibn ‘Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda:
 “Tidak boleh kawin seorang yang sedang ihram, dan tidak boleh
 mengawinkan serta tidak boleh melamar.” (HR. Muslim)

2. Calon istri dengan syarat:

- a. Beragama Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik”³⁵

- b. Tidak ada halangan syar’i yang menyebabkan haramnya pernikahan seperti tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah
- c. Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita
- d. Tidak sedang melakukan ihram

3. Wali dari pihak perempuan

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 35.

Yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³⁶ Akad dilangsungkan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Bila seorang perempuan tidak memiliki wali maka *sultan* (pemerintah) dapat menjadi wali baginya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَحَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه ابن ماجه)³⁷

Artinya: Dari ‘Urwah dari Aisyah berkata : ”Rasulullah bersabda apabila seorang wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar, dan sulthan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.”

(HR.Ibnu Majah)

Syarat-syarat wali adalah:

- a. Seorang laki-laki, merdeka, dewasa dan berakal, dan seorang muslim maka tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali bagi muslim.³⁸
- b. Seorang yang adil, yaitu tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil.
- c. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji maupun umrah

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 90.

³⁷ Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah...*, 590.

³⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Jilid II (Damaskus: tt), 89.

4. Dua orang saksi

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, di antaranya dalam:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَتَمِسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”³⁹

Seorang saksi harus memenuhi syarat berakal, dewasa, dapat mendengar dan memahami perkataan akad.⁴⁰ Sedangkan syarat yang lain adalah beragama Islam, seorang laki-laki, adil dan merdeka, serta tidak sedang melaksanakan ihram. Menurut Hanafi seorang saksi tidak harus laki-laki dan sah akad bila disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, selain itu menurut Hanafi seorang saksi tidak disyaratkan adil.⁴¹

5. Sighat akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk ijab penyerahan dari pihak pertama dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat-syarat akad adalah:

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 480.

⁴¹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh al-Islam 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Cairo: Dar al-Hadis, 1994), 25.

- a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul yang diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- b. Ijab dan qabul menggunakan bahasa yang jelas dan dapat difahami oleh orang yang berakad.⁴² Dalam bahasa Arab dengan kata *zawaja* atau *nakaha* atau dengan terjemahannya yang dapat difahami.
- c. Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi pernikahan untuk masa tertentu.

4. Hukum Pernikahan

Tentang hukum melakukan pernikahan, Ibnu Rusyd menjelaskan golongan fuqaha', berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib, sedangkan ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk sebagian yang lain.⁴³

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.⁴⁴

⁴² Zainuddin Ibn 'Abdil Aziz, *Fathu al-Mu'in...*, 99.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1988), 2.

⁴⁴ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 6516.

1. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina,⁴⁵ maka wajib baginya untuk menikah. Ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang, jika penjagaan itu harus dengan pernikahan dan menjaga itu wajib maka hukum melakukan pernikahan menjadi wajib.
2. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah, bagi orang-orang yang berkeinginan dan memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak dikhawatirkan berbuat zina.⁴⁶
3. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram, yaitu bagi orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' dan tidak mempunyai kemampuan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga dapat menelantarkan istri dan keluarganya.
4. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina jika tidak kawin. Hanya saja tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.⁴⁷
5. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah, bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan apabila menikah tidak akan

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 458 .

⁴⁶ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, 6517.

⁴⁷ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta: Kencana, 2006), 21.

menelantarkan istrinya. Juga dikatakan mubah bagi orang yang memiliki dorongan dan penghambat dalam melaksanakan pernikahan sama.⁴⁸

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan perkawinan

Pada hakekatnya Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada-Nya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”⁴⁹

Secara garis besar tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah beribadah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sehingga timbullah kebahagiaan

⁴⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, 459.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 523.

dan kasih sayang antar anggota keluarga serta, sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁰

Allah SWT menciptakan manusia dengan dilengkapi naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan, yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Ali ‘Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah

⁵⁰Ibid., 406

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁵¹

Berdasarkan ayat ini maka salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan naluri seksual, naluri cinta kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab dan juga untuk memenuhi naluri manusia untuk mempunyai keturunan yang sah dan diakui oleh dirinya sendiri dan masyarakat.

2. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan pernikahan dan menyukainya dan segala akibat yang bertalian dengan pernikahan, karena pernikahan juga mengandung manfaat yang besar bagi seseorang secara pribadi juga bagi umat bahkan bagi manusia keseluruhan. Di antara hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan.

Dengan pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan dan dapat melestarikan kehidupan bumi. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia, dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia, karena kemakmuran dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.⁵²

Selain mendapatkan keturunan pernikahan juga untuk membangun masyarakat yang terdiri dari unit-unit kecil yaitu keluarga. Dan merupakan

⁵¹Ibid., 51.

⁵² Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo dan Shobahussurur, dari *Hikmat at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256.

bagian masyarakat yang menjadi faktor penentu ketenangan dan kedamaian di lingkungannya.⁵³

b. Menyalurkan naluri seksual dan memelihara diri dari kerusakan

Pernikahan dapat membentengi diri dari godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat.⁵⁴ Karena sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan untuk keluar, pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks sehingga terpelihara dari sesuatu yang diharamkan.

Ketenangan hidup dan rasa kasih sayang dapat diwujudkan dalam pernikahan. orang yang tidak melakukan penyaluran naluri seksnya dengan pernikahan akan menimbulkan kerusakan bagi dirinya, orang lain bahkan pada masyarakat. Karena manusia memiliki nafsu dan dorongan nafsu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah Yusuf ayat 53:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣)

Artinya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu

⁵³ Abu Zahrah, *Al-Ahwal ash-Shakhsyah* (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997), 20.

⁵⁴ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, diterjemahkan oleh Muhammad Baqir, dari *Kitab Adab an-Nikah*, (Bandung: Kharisma, 1997), 35.

yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”⁵⁵

c. Menghibur hati dan memberikan ketenangan jiwa

Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang disenangi, adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Karena istri sebagai teman dalam suka dan duka serta penolong dalam mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan, semua ini menimbulkan ketenangan di dalam hati serta mengembalikan semangat jiwa untuk mengerjakan ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ
حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
(١٨٩)

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar merasa tentram disampingnya.”⁵⁶

d. Pengelolaan rumah tangga

Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga dan mengatur rumah sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 242.

⁵⁶ Ibid., 175.

dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.⁵⁷

Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Allah, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

B. Pencatatan Pernikahan

Di dalam hal pencatatan pernikahan, Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan peristiwa yang penting dan juga mempunyai banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah pernikahan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ لَّأَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 457.

Artinya “ wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....(QSAI-Baqarah[2]:282)

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.⁵⁸ Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan pernikahan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitshaqan ghalizan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁵⁹

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 100.

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107.

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Di antara Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 ayat 1 yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954.⁶⁰

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶¹

Di samping ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, maka menurut Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 di atas mengatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga muat dalam daftar pencatatan.⁶²

⁶⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 217.

⁶¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), 71.

⁶²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 65.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dicatatkan dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.⁶³

Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam Bab II PP No. 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah:
 - a. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk.
 - b. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya.
2. Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975.⁶⁴

Yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan perceraian pada KUA Kecamatan bagi umat Islam dan

⁶³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 65

⁶⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 65

Catatan Sipil bagi nonmuslim.⁶⁵ Mengenai hal tentang pencatatan perkawinan, akan dijelaskan dalam ketentuan UU berikut ini:

1. Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁶⁶ Pada penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa: “dengan perumusan Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945”. “yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya itu dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini.”⁶⁷
2. Pasal 4 KHI: “perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila suatu perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam maka perkawinan itu adalah sah karena telah memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan. Namun demikian, perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan belum dicatat pada Pegawai Pencatat yang berwenang/belum memiliki akta nikah. Oleh sebab itu, meskipun secara materiil perkawinan itu sah tetapi secara formil belum sah, sehingga selamanya dianggap

⁶⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 14..

⁶⁶ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 18.

⁶⁷ Penjelasan dari UU No 1 Tahun 1974.

tidak pernah ada perkawinan kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sehubungan dengan pencatatan perkawinan di atas, dalam UU diatur pada:

1. Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penjelasan umum angka 4 huruf b, dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

2. UU No. 22 tahun 1946 pasal 2

Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan ke dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh menteri agama.

3. KHI pasal 2, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1.

4. PP No. 9 Tahun 1975

- a) Pasal 2 ayat 1 pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh

pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

b) Pasal 11 ayat 2 kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

5. PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 26 sampai pasal 27.

C. Pelaksanaan Pernikahan

Pelaksanaan perkawinan adalah semua kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebelum sampai dengan saat dilakukannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.⁶⁸

1. Menurut UU No. 1 tahun 1974

Tentang pelaksanaan perkawinan, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun Peraturan Perundang-undangan sendiri tersebut terdapat di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun tata cara perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

⁶⁸ Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2007), 25.

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁶⁹

2. Menurut KHI, terdapat dalam Pasal 6 yaitu:

⁶⁹ PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 6

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Menurut PMA 11 tahun 2007

Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA dan ayat 2 menyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan P3N, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan tersendiri.⁷⁰ Secara umum tatacara pelaksanaan perkawinan sekarang sudah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12.

Khusus bagi mereka yang beragama Islam, sesuai dengan penjelasan Pasal 12, maka mereka dalam melaksanakan perkawinan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Adapun ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. Mereka yang hendak melakukan perkawinan harus membawa surat keterangan dari kepala Kampung atau Kepala Desa masing-masing.
- b. Orang yang melakukan perkawinan harus lebih dulu menyampaikan kehendak mereka itu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat akan dilangsungkan perkawinan.
- c. Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami dan calon istri atau oleh wakil mereka yang sah.
- d. (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melaksanakan perkawinan tersebut dengan cara menempelkannya.
(2) penempelan pengumuman harus pada tempat-tempat yang mudah dibaca orang.
(3) lama berlakunya penempelan pengumuman kehendak nikah tidak boleh kurang dari 10 hari. Artinya sebelum lewat 10 hari tidak boleh dilepas atau dirobek.
- e. Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami istri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan nikah dilangsungkan.
- f. Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan akad nikah sebelum hari ke sepuluh terhitung dari tanggal pemberitahuan diterimanya dan hari waktu pemberitahuan tidak diperhitungkan.

- g. Akad nikah dilakukan di muka Pegawai Pencatat Nikah dan calon suami serta wali harus hadir sendiri pada saat akad nikah dilaksanakan.
- h. (1) Akad nikah dilakukan dengan ijab kabul di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti tentang pembayaran mahar.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah harus mencatat perkawinan itu dalam buku daftar nikah.⁷¹

Tata cara proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.⁷²

1. Pemberitahuan kehendak nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ataupun Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan penasihat dan bimbingan hendakny mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya.

⁷¹ Soemiyati, Hukum perkawinan islam..., 74.

⁷² Mardani, Hukum perkawinan islam..., 19.

- b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
- d. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepala calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.
- e. Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada P3N/Pembantu P3N yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

2. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.

3. Pengumuman kehendak nikah

PPN/ P3N mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan:

- a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
 - b. Oleh P3N di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.
4. Akad nikah dan pencatatan.
- a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua (model N).
 - b. Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta PpP yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam Akta Nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau Wakil PPN.
 - c. Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan P3N atau Wakil P3N.
 - d. P3N membuat Kutipan Akta Nikah (Model Na) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.
 - e. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan istri.

- f. Nomor di tengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- g. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh P3N, dalam hal Wakil P3N yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil P3N hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani Akta Nikah pada kolom 6.
- h. PPN berkewajiban mengirimkan Akta Nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahkannya, apabila folio terakhir pada buku Akta Nikah selesai dikerjakan.
- i. Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima. Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 11 kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tandatangan penerima. Selanjutnya P3N menyimpannya bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).⁷³

⁷³ Ibid., 21.

D. Modin

1. Sejarah dan Pengertian Modin

Sejarah modin berawal ketika ajaran Islam masuk ke Indonesia di mana terdapat akulturasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Dalam perkembangannya atau proses masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari peran budaya atau disebut akulturasi agama.⁷⁴ Kemunculan dan perkembangan Islam di Indonesia menimbulkan transformasi kebudayaan. Transformasi suatu kebudayaan peradaban melalui pergantian agama terjadi karena Islam bukan hanya menekankan keimanan yang benar, akan tetapi juga mengatur bagaimana tingkah laku yang baik. Ajaran yang terdapat dalam Islam harus diimplementasikan oleh setiap pemeluknya dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengaruh budaya terhadap masuknya Islam di Indonesia sangatlah kuat. Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, syari'ah dan akhlak, menampakkan perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan utama kemanusiaan dan budaya di Indonesia yang sangat plural. Hal yang sama juga terjadi pada munculnya modin sebagai petugas resmi urusan agama di sebuah desa yang tidak lepas dari pengaruh budaya.

Pola-pola struktural Jawa Islam kontemporer memiliki kemiripan dengan yang ada dalam mitologi zaman Mataram dan organisasi keraton. Pada

⁷⁴ Mulyosari, *Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasusatas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman. Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama. Vol. VIII, No. 2, Desember 2007*, 140.

kalangan masyarakat Jawa, kegiatan agama seperti memimpin doa, mencatat peristiwa kelahiran, pernikahan, khitanan, dan penyelenggaraan upacara kematian harus dipimpin oleh orang spesial dalam menyelenggarakan ritual Islam disebut dengan *modin*.

Kemunculan *modin* (*kaur* atau *penghulu*) sebagai pemimpin agama dalam kehidupan masyarakat Jawa dikarenakan akulturasi budaya Jawa. Contohnya adalah budaya *Slametan* atau *wilujengan*. *Slametan* atau *wilujengan* adalah suatu upacara pokok atau unsur terpenting dari hampir semua ritus dan upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya dan penganut Agami Jawi khususnya. Salah satu aktivitas keagamaan penting lain dalam sistem religi Agami Jawi yaitu kunjungan ke makam nenek moyang yang disebut *nyekar*. Suatu *slametan* biasanya diadakan di rumah keluarga dan dihadiri keluarga, kerabat dan tetangga. *Slametan* biasanya diadakan pada malam hari. Para tamu duduk di atas tikar dan di tengah-tengahnya diletakkan dua atau tiga buah tampah berisi hidangan *slametan* berisi nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk dan hiasannya. Setelah semuanya siap, *modin* atau *kaum* diminta untuk mempersilahkan doa yang terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an. Selesai mengucapkan maka *modin* dipersilahkan oleh tuan rumah untuk mulai menyantap hidangan disusul para tamu.

Pada tahun 1814 di masa Raffles, telah ada seorang *Penghulu* yang merupakan anggota konstitusi dari warga asli Indonesia yang berkedudukan sebagai pemimpin masjid. Perannya adalah membantu muslim untuk

memutuskan problem yang muncul. Kemudian istilah ini lebih dikenal sebagai muadzin yang mempunyai arti pemimpin Masjid. Perkembangan selanjutnya muncul istilah Kaum atau yang bisa disebut modin, rois atau the mosque official (Pemimpin Masjid). Modin bertugas mengurus urusan orang yang mau menikah dan orang yang kena musibah kematian. Kemudian, sekitar orde lama, modin masuk menjadi bagian dari Administrasi Desa, dimana bisa kita lihat, secara struktural, seorang modin dipilih oleh Kepala desa.⁷⁵

Secara struktural posisi jabatan bidang kesra (Kesejahteraan Rakyat) atau modin memang berada di bawah kepala desa, akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang modin lebih banyak langsung terjun di tengah kehidupan masyarakat sehingga sangatlah tepat jika secara administratif seorang modin berubah dengan istilah Kaur Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat). Seorang kaum bertugas memimpin berbagai ritual, seperti kematian, kelahiran dan sebagainya. Sebagai contoh, dia memimpin berdo'a, yasinan, tahlil, slametan, ziarah kubur dan sebagainya. Sebagai imbalan jasa, seorang Kaum diberi bengkok atau lahan pertanian seluas 200 m². Tanah tersebut milik Pemerintah Desa. Selama menjadi Kaum, dia berhak memanfaatkan lahan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya.⁷⁶

⁷⁵Mulyosari, *Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasusatas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman. Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama. Vol. VIII, No. 2, Desember 2007, 140.*

⁷⁶Mulyosari, *Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasusatas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman. Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama. Vol. VIII, No. 2, Desember 2007, 141.*

Kata modin, menurut sebuah primbon kecil yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustofa, diambil dari kalimat “*imaa(muddin)*” yang berarti “sesepuh agami”. Istilah lain dari modin adalah *qayyim*, kepanjangan dari *qayyimuddin* (artinya, “penguasa agama”). Dalam primbon bertulis Arab pegon Kiai Bisri dengan terjemahan bahasa Indonesia:

“Minongko sesepuh agami wonten ing kampung utawi dusun, modin kedah luwes serawunganipun kaliyan masyarakat dusun, entengan, cekatan, gatean, lan trisno serta welas asih dateng rakyat dusunipun. Boten perduli tengah ndalu, utawi fajar-fajar serto nuju gerimis pisan bilih rakyat ambetahaken, modin ingkang luwes temtu tumandang ing damel”

Terjemah Bebasnya :

“Sebagai pemimpin agama di kampung atau desa, modin sepatutnya memiliki keluwesan dalam berinteraksi dengan masyarakat desa, suka menolong, cepat dalam bertindak, memiliki sensitivitas sosial, dan memiliki rasa kasih serta sayang kepada masyarakat desanya. Tidak peduli waktu tengah malam atau fajar serta dalam keadaan gerimis sekalipun, apabila rakyat desa membutuhkan, modin tetap harus luwes dalam menyelesaikan persoalan yang datang kepadanya.”⁷⁷

⁷⁷ M.najibur Rohman, “MODIN” <http://fiveforum.blogspot.com/2013/05/modin.html> Diakses pada tanggal 23 desember 2020.

Menurut Syahbudin latif Modin adalah seorang pegawai rendahan dalam soal administrasi agama yang membantu seorang penghulu dalam berbagai upacara keagamaan.⁷⁸

Modin pada abad ke- 19 di Jawa digunakan untuk menunjukan pejabat keagamaan tingkat desa, satu tingkat dibawah penghulu kabupaten atau naib. Modin bertanggung jawab mengenai urusan-urusan keagamaan seperti menemani pengantin wanita dan pria ke naib dan membantu mempersiapkan pernikahan. Di sejumlah wilayah di Jawa, muncul berbagai nama untuk modin, seperti kaum, lebe atau amil.⁷⁹

2. Tugas dan Posisi Modin dalam Pemerintah Desa

Penggunaan istilah modin sebenarnya hanya merujuk pada kesepakatan dalam masyarakat. Sedangkan dalam struktur desa sendiri tidak ditemukan nomenklatur penggunaan kata modin. Hanya saja, biasanya sebutan modin digunakan pada pejabat desa yang menduduki posisi sebagai Kepala seksi kesejahteraan.

Hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 84 Tahun 2015). Dalam menjalankan

⁷⁸M. Syahbudin Latif, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*. Yogyakarta: Media Perssindo, 2000, 190.

⁷⁹Mulyosari, *Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasusatas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman. Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama. Vol. VIII, No. 2, Desember 2007, 411.*

pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.⁸⁰

Dalam menjalankan sekretariat desa, pemerintah desa dipimpin oleh sekretaris desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.⁸¹ Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁸² Sedangkan pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan yang dipimpin oleh kepala seksi.⁸³

Penyebutan modin lebih erat kaitannya dengan kepala seksi kesejahteraan yang memiliki Kepala seksi kesejahteraan yang mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta

⁸⁰ Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 84 Tahun 2015.

⁸¹ Pasa 3 Permendagri No. 84 Tahun 2015.

⁸² Pasal 4 Permendagri No. 84 Tahun 2015.

⁸³ Pasal 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015.

motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.⁸⁴ Dalam tugas melakukan pemberdayaan keluarga inilah kemudian kepala seksi kesejahteraan juga merangkap sebagai modin atau Pembantu P3N.

Untuk lebih mempejelas tugas pokok dan fungsi pejabat desa, Bupati Sidoarjo kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam pasa 11 misalnya, Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa.
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana.
- c. Melaksanakan pemberian sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga (pkk), keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- e. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang pembangunan dan perekonomian.
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi kecil dan menengah serta kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.

⁸⁴ Pasal 9 ayat (3) huruf (b) Permendagri No. 84 Tahun 2015

- g. Pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang pembangunan dan perekonomian.
- h. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
- i. Penyelenggaraan administrasi pembangunan dan perekonomian didesa.
- j. Pemberian fasilitasi, pembinaan dan menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
- k. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
- l. Pemberian fasilitasi dalam pengumpulan dan penyaluran dana/ bantuan bencana alam dan bencana lainnya.
- m. Melaksanakan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh.
- n. Pemberian fasilitasi pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI).
- o. Pemberian fasilitasi administrasi pelaksanaan Nikah Talak dan Rujuk (NTCR).
- p. Pemberian fasilitasi perawatan jenazah.
- q. Menyusun laporan seksi kesejahteraan.
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya.

- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.⁸⁵

E. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat (4) tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu tugas PPN di desa tertentu.⁸⁶

PPN yang berkedudukan di setiap desa atau pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di setiap kecamatan yang di bawah setruktur KUA.⁸⁷ Pada surat dan intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/113 Tahun 2009 tentang penggunaan dana penerimaan Negara bukan pajak nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu pegawai pencatat nikah, dijelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja P3N dan mengangkat P3N yang Baru, kecuali untuk daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah pedalaman, perbatasan daerah dan kepulauan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.⁸⁸

Surat Inspektur Jendral Kementerian Agama RI: 1J/INV/STL/R/PS. 01.5/0078/2003 tentang penataan dan batasan kewenangan P3N menegaskan bahwa P3N yang melanggar atau mengabaikan tugas pokok dan fungsinya

⁸⁵ Pasal 11 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 54 Tahun 2016

⁸⁶ Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Pasal 1 Ayat (4).

⁸⁷ Muhammad Zaid dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam yang Kontroversial)*, Jakarta: Graha Cipta, 2005, Cet 1, 38.

⁸⁸ Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/113 Tahun 2009 *Penggunaan Dana penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.

termasuk melibatkan diri dalam politik praktis dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

1. Syarat Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai P3N adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Beragama islam;
- c. Membantu dan mengamalkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonsia, serta tidak terlibat dalam gerakan yang tidak menentang agama Islam;
- e. Berakhlak Mulia;
- f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Berusia antara 25-26 tahun;
- h. Lulusan pendidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah;
- i. Lulus testing yang diadakan khusus untuk itu oleh departemen agama kabupaten/ kotamadya. Materi testing untuk diangkat menjadi Pembantu pegawai pencatat nikah, sebagai berikut :⁹⁰

⁸⁹Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.*

⁹⁰Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.*

1. UUD 1945.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
3. Fiqih Munakahat dan Fiqih Ibadah.
4. Tulis Baca Al quran.
5. Praktik Khutbah Nikah dan Doa Upacara nikah serta memberikan nasihat perkawinan.

2. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah :⁹¹

- a. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berada di luar Jawa, atas nama pegawai pencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam di wilayahnya.
- b. Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di Jawa membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah di KUA yang berada di wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.

Tugas P3N membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan oleh petugas KUA tersebut,

⁹¹Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 *Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.*

sedangkan P3N hanya mencatat dan mengembalikan Berkas kepada Kantor Urusan Agama. Tugas P3N tidak hanya membantu P3N menikahkan saja akan tetapi setiap kali ada yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daerah tersebut contohnya memandikan jenazah.⁹²

Pada tanggal 26 Januari 2015 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Instruksi Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Instruksi yang baru ini Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam memerintahkan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi se-Indonesia agar selektif dalam melakukan pengangkatan Pembantu P3N. Rekomendasi pengangkatan Pembantu P3N harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. Pengangkatan Pembantu P3N juga harus dilakukan dengan didasarkan pada kebutuhan. Yaitu wilayah kecamatan memang tidak bisa dijangkau oleh Petugas Pencatat Nikah dan terbatasnya SDM dibanding luas wilayah.

Isi dari Instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengangkatan P3N agar dilakukan secara selektif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. *Kedua*, Rekomendasi pengangkatan P3N dari kepala seksi yang membidangi urusan agama harus memperhatikan hal sebagai berikut :

⁹²Kementrian Agama Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam Direktorat Urusan masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, 2010. 12.

1. KUA tersebut masuk dalam kategori D1 dan D2 yang ditetapkan oleh kepala kemenag provinsi dan dianggap wilayah yang tidak terjangkau oleh P3N karena terbatasnya SDM dibanding dengan luas wilayah.
2. P3N harus berdomisili di tempat penugasan.
3. P3N harus memiliki kualitas dan berkompetensi di bidang hukum dan administrasi pernikahan

Ketiga, Membantu melaporkan dan memantau pelaksanaan instruksi pengangkatan P3N kepada Dirjen Bimas Islam. *Keempat*, melaksanakan instruksi dengan penuh tanggung jawab. Dengan dikeluarkan instruksi tersebut Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/113 tahun 2009 tentang penggunaan dana PNBPN nikah rujuk dan pencatatan Pembantu pegawai pencatat nikah dinyatakan tidak berlaku.

PMA No 19 Tahun 2019 mengganti istilah P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Dengan istilah P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan). Perubahan yang berhubungan dengan pembantu pegawai pencatat nikah hanya ditemui dalam bentuk perubahan istilah. tidak terdapat perubahan-perubahan mengenai tugas yang dilakukan dan tidak ditemukan penjelasan-penjelasan baru mengenai pembantu pegawai pencatat perkawinan.

F. Teori Utility Jeremy Bentham

1. Biografi Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan filsuf utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis, yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19 baik di Inggris maupun pada level Dunia. Dia dijuluki sebagai “*Luther of the Legal World*”(Luther dalam bidang Hukum), sebab pada akhir abad ke-18 Masehi, sistem hukum Inggris yang kuno, korup dan belum direformasi bisa dipandang sebagai agama nasional, sementara ia tidak hanya berani menentanginya, akan tetapi juga mencipta suatu struktur hukum baru, yang menarik banyak penganut dan pada akhirnya mengilhami terjadinya reformasi. Ia telah melakukan kritik radikal dan rekonstruksi terhadap semua institusi Inggris baik di bidang ekonomi, moral, agama, pendidikan, politik maupun hukum.⁹³

Bentham dilahirkan pada 15 Februari 1748 di Red Lion Street, Houndsditch, London sebagai putra dari seorang Pengacara. Dikatakan, ia termasuk anak jenius, karena pada umur 3 tahun sudah bisa membaca dengan penuh minat ‘History’ karya Paul de Rapin dan mulai mempelajari bahasa Latin. Sebagian besar masa kecilnya dihabiskan dengan penuh keceriaan di dalam asuhan dua neneknya di pedesaan. Di Westminster School, ia memiliki prestasi menonjol dalam bidang bahasa Yunani dan bahasa Latin. Pada tahun

⁹³ International Headquarters, Jeremy Bentham, The Encyclopedia Americana, Vol. 27 (Kanada, Grolier Incorporated, 1978), 559

1760, ia melanjutkan pendidikannya ke Queen College, Oxford, di mana kecerdasannya nampak melalui perkenalannya dengan buku ‘Logic’ karya Robert Sunderland. Setelah lulus, pada November tahun 1763, ia memasuki studinya di Lincoln’ Inn dan bertindak sebagai siswa pada King’s Bench, dimana ia bisa mendengarkan dengan penuh gairah terhadap nasehat-nasehat Lord Mansfield pada Desember 1763.⁹⁴

Pada tahun 1788, Bentham bekerja keras untuk menemukan prinsip-prinsip legislasi. Sebuah karya besar yang membuatnya dikenal selama bertahun-tahun kemudian adalah “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*”, yang diterbitkan pada tahun 1789. Dalam buku ini, Bentham mendefinisikan prinsip Utilitas. Ketenaran karya ini menyebar secara luas dan cepat. Bentham mendapatkan kewarganegaraan Prancis pada tahun 1792, dan saran-sarannya diterima dengan penuh hormat oleh Negara-negara Eropa dan Amerika. Demikian pula, ada banyak tokoh dunia yang rajin berkoresponden dengannya, salah satu dari mereka adalah Muhammed Ali. Pada tahun 1817, ia menjadi anggota majelis pada Lincoln’s Inn. Bentham berambisi untuk menyiapkan buku undang-undang baik untuk konsumsi dalam negeri maupun luar negeri. Kodifikasi hukum merupakan fokus utama aktifitasnya, namun ia tampaknya meremehkan kesulitan-kesulitan intrinsik dalam tugas ini dan kebutuhan akan perlunya keragaman institusi yang diadaptasikan pada tradisi

⁹⁴ The University Of Chicago , Jeremy Bentham, A New Survey Of Universal Knowledge :Encyclopaedia Britannica, Vol. 3 (Chicago : William Benthon Publisher, 1965), 485.

dan peradaban negara-negara yang berbeda. Pada tahun 1823, Bentham membantu pendirian Westminster Review (1824), jurnal utilitarian yang pertama, untuk menyebarkan prinsip-prinsip radikalisme filosofis dan juga pendirian University College. Bentham meninggal pada 6 Juni 1832 di Queen Square dalam umur 85 tahun. Sesuai dengan wasiatnya, tubuhnya dibedah di hadapan rekan-rekannya. Kemudian, kerangkanya dikonstruksi dengan dipenuhi lilin dan pakaiannya dikenakan pada kerangka tersebut. Patung Bentham tersebut disimpan di University College, London.⁹⁵

2. Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham

Pada masa Bentham, dunia feodal telah lenyap. Namun masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan : kelas atas, kelas menengah dan kelas buruh, dan Revolusi Industri baru dimulai. Keadaan masyarakat kelas bawah dalam hirarki sosial sangat memilukan. Hak-hak di bidang Peradilan bisa dibeli, dalam arti, orang yang tidak memiliki sarana untuk membelinya, maka tidak akan mendapatkan hak-hak tersebut. Tidak ada undang-undang yang mengatur buruh anak sehingga eksploitasi terhadap mereka terjadi di tempat kerja. Hal itu tumbuh subur pada masa Bentham. Ia melihat hal itu sebagai ketidakadilan yang memilukan sehingga mendorongnya menemukan cara terbaik untuk merancang kembali (*redesign*) sistem yang tidak adil ini dalam bentuk aturan moral yang simple yang bisa dipahami semua orang baik kaya maupun miskin.

⁹⁵ Jeremy Bentham, A New Survey Of Universal Knowledge :Encyclopaedia Britannica, Vol. 3 486.

Bentham mengatakan bahwa yang baik (good) adalah yang menyenangkan (pleasurable), dan yang buruk (bad) adalah yang menyakitkan (pain). Dengan kata lain, hedonisme (pencarian kesenangan) adalah basis teori moralnya, yang biasa disebut Hedonistic utilitarianism. Nilai utama adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai intrinsik. Sementara apa pun yang membantu pencapaian kebahagiaan atau menghindari penderitaan adalah nilai instrumental. Oleh karena boleh jadi kita melakukan sesuatu yang menyenangkan dalam rangka mendapatkan sesuatu lain yang menyenangkan juga, maka kesenangan memiliki dua nilai yaitu intrinsik dan instrumental.⁹⁶

Aliran Utilitarianisme merupakan tradisi pemikiran moral yang berasal dari Inggris, yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan yang berbahasa Inggris. David Hume (1711-1776), filsuf Skotlandia, merupakan pemrakarsa awal penting bagi pertumbuhan dan perkembangan aliran ini. Ia telah menemukan istilah Utilitarianism Hume yakin bahwa baik adalah tindakan yang memiliki utility dalam arti tindakan itu membuatmu dan banyak orang lain menjadi bahagia'. Namun, ia tidak pernah mengembangkan ide ini dalam suatu teori yang komprehensif. Baru kemudian, Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal

⁹⁶ Nina Rosenstand, *The Moral of The Story : An Introduction to Ethics* (New York : McGrawHill,2005),216.

Introduction to the Principles of Morals and Legislation yang terbit di tahun 1789.

Menurut Bentham, utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Dengan demikian, Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang kongkret, bukan yang abstrak. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih up to date. Melalui buku tersebut, Bentham menawarkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat.⁹⁷

Menurut Bentham, Hukum Inggris yang berlaku saat itu berantakan, karena tidak disertai landasan logis atau ilmiah apa pun. Sebagian orang berpendapat hukum harus didasarkan atas Alkitab atau kesadaran pribadi dan sebagian lain atas hak-hak alami dan yang lain lagi atas akal sehat para hakim. Seluruh penjelasan ini menurut Bentham adalah ‘tidak masuk akal ‘ dan ‘lemah’. Atas dasar itu, Bentham menawarkan suatu hukum dan moralitas yang

⁹⁷ K. Berten, Etika (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), 247

‘ilmiah’ dengan cara yang sama seperti klaim sosiologi dan psikologi yang telah membuat kajian tentang manusia menjadi ilmiah.⁹⁸

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan 2 penguasa yang berdaulat : ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidak senangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dikemukakan Hedonisme Klasik. Dengan demikian, Bentham sampai pada prinsip utama utilitarianisme yang berbunyi : the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat.

Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Dengan demikian, bukan hanya the greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi the greatest happiness

⁹⁸ Dave Robinson dan Christ Garratt, Mengenal Etika For Beginners (Bandung : Mizan, 1998), 70.

juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Menurut Bentham ada faktor-faktor yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan. Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) menurut intensitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya merupakan sifat dasar dari semua kepuasan dan kepedihan ; sejumlah kekuatan tertentu (*intensitas*) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.
- 2) menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih itu. Contoh semakin pasti anda dipromosikan , semakin banyak kepuasan yang anda dapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, semakin banyak kepuasan yang dirasakan.
- 3) menurut kesuburan (*fecundity*), dalam arti kepuasan akan memproduksi kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Maksudnya kita perlu mempertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan. “Kesuburan” mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan tetap menjadi diri”murni”nya sendiri, dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan atau pun sebaliknya kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.
- 4) menurut jangkauan (*extent*) perasaan tersebut. Dalam arti kita perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita

mempengaruhi orang lain. Contoh orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit.

Perhitungan ini akan menghasilkan saldo positif, jika kredit (kesenangan) melebihi debetnya (ketidaksenangan). Salah satu contoh adalah cara Bentham memperhitungkan kadar moral dari perbuatan minum minuman keras sampai mabuk. Hasil perhitungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:

MABUK

Ketidaksenangan (debet)	Kesenangan (kredit)
Lamanya : Singkat.	Intensitas : Membawa banyak kesenangan.
Akibatnya : Kemiskinan, Nama Buruk, Tidak sanggup bekerja.	Kepastian : Kesenangan pasti terjadi.
Kemurnian : Dapat diragukan (dalam keadaan mabuk sering tercampur ketidak senangan).	Jauh / Dekat : Kesenangan timbul cepat.

Seandainya tidak ada segi negatif, niscaya keadaan mabuk akan merupakan sesuatu yang secara moral baik. Tetapi sebagai keseluruhan saldo adalah negatif dan menurut Bentham malah sangat negatif , sehingga

kemabukan harus dinilai secara moral sangat jelek. Moralitas semua perbuatan dapat diperhitungkan dengan cara sejenis.

Meskipun kalkulasi-kalkulasi semacam ini dalam penerapannya akan menemui persoalan kompleks namun, menurut Bentham, hanya dengan kalkulasi seperti ini bisa diketahui dengan pasti berapa banyak kebahagiaan yang dihasilkan oleh tindakan seseorang bagi keseluruhan masyarakat (komunitas). Menurutny, mengejar kebahagiaan dengan cara yang rasional dan teratur merupakan suatu hal yang melegakan. Kelogisannya membuat kita percaya bahwa pengejaran itu akan berhasil jika kita mengarahkan pikiran kita pada hal tersebut. Kebahagiaan, ketika dijelaskan dengan sangat hati-hati, tampak dapat diraih, sesuatu yang kita semua inginkan. Namun Bentham memahami bahwa kita tidak dapat meluangkan begitu banyak waktu untuk menghitung jumlah kebahagiaan sehingga kita tidak pernah melakukan hal-hal yang sebenarnya membuat kita bahagia. Kenyataannya, Bentham tidak pernah membayangkan bahwa masyarakat umum akan menggunakan “kalkulus kepuasan”. Justru, ia memaksudkan perhitungan tersebut sebagai alat bagi para politikus untuk membantu mereka mengesahkan peraturan yang memaksimalkan level-level umum kebahagiaan.

Sebagaimana dijelaskan Bentham, maksud sebenarnya dari kalkulus itu adalah perundang-undangan yaitu membagi kebahagiaan secara adil kepada seluruh komunitas. Dengan menyerahkan semua peraturan rumit, formula

kompleks dan kalkulus berat tersebut kepada para politikus, kita dapat meneruskan hidup dengan menjadi bahagia.⁹⁹

Bila dilihat sepintas, gerakan utilitarianisme tampak sederhana, tidak radikal. Karena siapapun akan sepakat bahwa kita harus melawan ketidaksenangan (pain) dan mempromosikan kesenangan (pleasure). Namun keradikalan prinsip ini akan tampak ketika kita membandingkannya dengan gambaran tentang moralitas lama ; yakni semua rujukan ditujukan kepada Tuhan atau aturan-aturan moral abstrak “yang tertulis di surga”. Moralitas tidak lagi dipahami sebagai kepercayaan pada suatu aturan yang diberikan oleh yang ilahi atau sejumlah perangkat aturan yang tidak bisa diubah. Pokok moralitas dilihat sebagai kebahagiaan makhluk-makhluk di dunia ini, dan tidak lebih dari itu. Dan kita diperbolehkan –bahkan dituntut- untuk melakukan apa yang perlu untuk memperoleh kebahagiaan. Itulah, yang pada waktu itu merupakan gagasan revolusioner. Para tokoh utilitarian adalah filsuf sekaligus aktifis gerakan sosial. Mereka berkeinginan agar ajaran mereka berbeda, tidak hanya dalam pemikiran, tetapi juga dalam praktek.¹⁰⁰

Menurut Benham, moralitas bukan sekedar soal menyenangkan hati Allah atau soal kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan merupakan upaya untuk sedapat mungkin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia ini. Bentham berpendapat bahwa ada satu prinsip moral yang utama, yakni ‘prinsip utilitas’.

⁹⁹Richard Schoch, *The Secret Of Happiness* (Jakarta : Hikmah, 2009), 51.

¹⁰⁰ James Rachels, *Filsafat Moral* (Yogyakarta : Kanisius, 2004), 171-172.

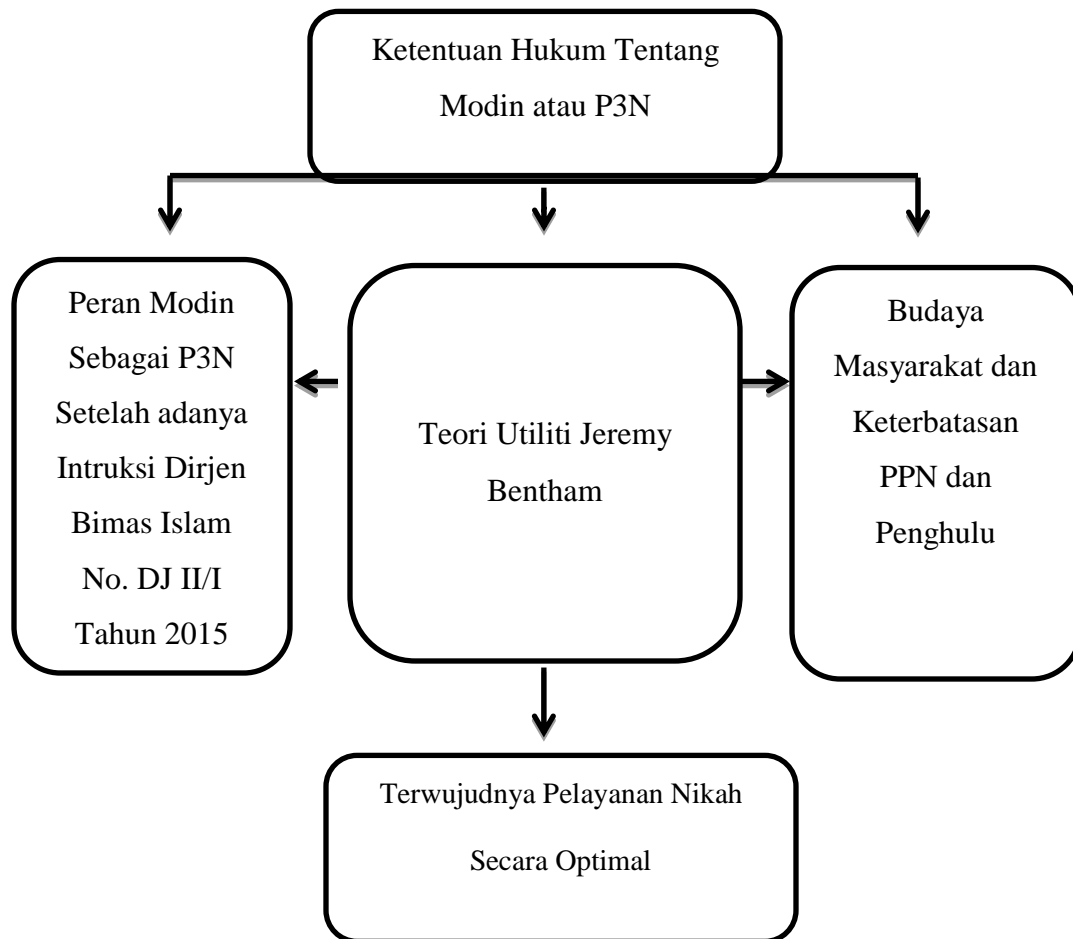
Prinsip ini menuntut agar setiap kali kita menghadapi pilihan dari antara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial, kita mengambil satu pilihan yang memiliki konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya.¹⁰¹

3. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini berangkat dari kasus yang ditemukan di lapangan. Kemudian penulis mengumpulkan data yang bersumber dari wawancara maupun buku-buku referensi tentang masalah yang berkaitan dengan kasus. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan verifikasi atau pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi dengan tujuan untuk meminimalisir adanya subjektivitas peneliti dalam proses pengumpulan data, yang nantinya akan berpengaruh pada hasil penelitian. Ketika data sudah benar-benar valid, peneliti akan menganalisanya dengan menggunakan teori utiliti Jeremy Bentham.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur kerangka berpikir penelitian, maka bisa dilihat pada bagan-bagan di bawah ini:

¹⁰¹James Rachels, Filsafat Moral, 169.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹⁰² Pendekatan ini relevan karena data yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian untuk mengungkapkan masalah.¹⁰³

Penelitian mengenai Peran modin sebagai P3N ini menggunakan pendekatan ilmu hukum dengan aspek empiris. Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara *das Sollen* and *das Sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Secara Substansif modin sudah tidak berfungsi lagi setelah adanya Intruksi Dirjen Bimas Islam No DJ II/I Tahun 2015, Namun masyarakat yang hendak mengurus berkas pernikahan masih menggunakan jasa Modin.

Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya kesenjangan dan ketidak jelasan mengenai peranan modin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur

¹⁰²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 12.

¹⁰³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 176.

penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan. Artinya dalam proses pengumpulan data Peneliti berperan serta turun ke KUA Kecamatan Candi, melakukan pengamatan sekaligus wawancara dengan Kepala KUA, Modin, Masyarakat Desa dan pihak-pihak yang terkait dengan peran modin sebagai P3N.

C. Latar Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di wilayah KUA Kabupaten Sidoarjo, di KUA Kabupaten Sidoarjo keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat dibutuhkan, mengingat disetiap KUA hanya ada dua PPN yang bertugas, sehingga KUA kerepotan dalam memberikan pelayanan pernikahan. Demikian juga yang dirasakan masyarakat ketika akan mengurus berkas pernikahan, meskipun kedudukan Modin Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan, masyarakat masih banyak yang melakukan pengurusan berkas pernikahannya melalui Modin atau Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Justru, mereka lebih senang apabila pengurusan berkasnya diurus oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang disajikan berupa data primer dan data sekunder. Antara lain:

1. Data adalah keterangan atau bahan yang dapat dijadikan kajian analisis. Untuk mempermudah penelitian ini, data yang dikumpulkan antara lain:
 - a. Data kondisi demografis, monografis dan sosial masyarakat kecamatan Candi.
 - b. Data terkait dengan P3N di KUA Kabupaten Sidoarjo.
2. Berdasarkan data yang dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:
 - a. Sumber Primer merupakan informasi yang dikumpulkan penulis langsung dari sumbernya.¹⁰⁴ Adapun data primer terdiri atas :
 - 1) Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo.
 - 2) Penghulu.
 - 3) Modin atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
 - 4) Calon Pengantin yang mendaftar di P3N dan yang langsung di KUA.
 - b. Sumber Sekunder, yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri atas buku-buku yang membahas tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah:

¹⁰⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*,107.

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional penghulu dan Angka Kreditnya.
- 3) Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 4) Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015.
- 5) Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003.
- 6) Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/113 Tahun 2009 Penggunaan Dana penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 8) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

E. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, di mana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari

yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁰⁵

Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dan wawancara dengan Kepala KUA kab Sidoarjo, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan calon pengantin tentang peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

- 2) Studi Dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung menggunakan data sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰⁶ Data sekunder diperoleh dengan cara mencari data dari beberapa Refrensi yang memuat tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), baik dari buku maupun dari peraturan-peraturan yang berlaku.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian sangatlah penting untuk memecahkan masalah. Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data Sehingga dapat ditemukantema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.¹⁰⁷ Proses yang akan dilalui peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. *Editing* (Pengeditan)

¹⁰⁵Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

¹⁰⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

¹⁰⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*,280.

Editing yaitu merangkum dan memilah data-data yang pokok untuk kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data hasil wawancara dengan subjek penelitian dan hasil observasi akan dipilih dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah melakukan editing, selanjutnya peneliti akan mengelompokkan data-data yang didapat kedalam bagian-bagian tertentu. Pertama, data yang berkenaan dengan Peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Kedua, data yang akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana Peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca adanya Intruksi Dirjen Bimas Islam No DJ II/1 Tahun 2015 .

3. *Analyzing* (Menganalisa)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

4. *Concluding* (Menyimpulkan)

Pada tahap ini peneliti melakukan pengambilan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas,

¹⁰⁸Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

dan mudah dipahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam fokus penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan peneliti untuk memvalidasi data yang didapatkan. Pengecekan terhadap sumber dan bahan data dilakukan dengan pola triangulasi dan bahan referensi. Triangulasi yaitu cara menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.¹⁰⁹

Dalam melakukan pengecekan dengan pola triangulasi peneliti melakukan pengecekan kebenaran suatu informasi dari informan yang satu dengan informan lainnya. Sebagai Contoh : Pertanyaan yang ditanyakan Kepada Instansi ditanyakan juga kepada Masyarakat dan Modin sebagai P3N dengan pertanyaan yang berbeda, jika jawaban yang didapatkan maksudnya sama maka data yang didapatkan dianggap data yang benar.

Adapun bahan referensi adalah media pendukung untuk membuktikan keabsahan data yang telah ditemukan oleh peneliti, misal perekam suara dan kamera.¹¹⁰ Dengan demikian, pada saat melakukan wawancara kepada narasumber, peneliti telah melengkapinya dengan recorder dan kamera sebagai bahan dokumentasi

¹⁰⁹Sugiyono, *Metode Penelitian* ..., 294.

¹¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian* ..., 294.

BAB IV
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CANDI KABUPATEN
SIDOARJO

A. Profil Kecamatan Candi

a. Profil Kecamatan Candi

Kecamatan Candi terletak dibagian Selatan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tk. II Sidoarjo dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wilayah KecamatanTanggulangun

Sebelah Selatan : Wilayah KecamatanSidoarjo

Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Selat Madura

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Tulangan

Luas wilayah Kecamatan Candi adalah Luas : 40,667 Ha yang menjadikan Kecamatan dengan desa Paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan ini meliputi 24 desa di seluruh Kecamatan Candi, yaitu:

1. Desa Candi
2. Desa Bligo
3. Desa Larangan
4. Desa Tenggulunan
5. Desa Sumokali
6. Desa Sepande
7. Desa Karangtanjung
8. Desa Kedung Kendo

9. Desa Sugihwaras
10. Desa Gelam
11. Desa Sumorame
12. Desa Ngampelsari
13. Desa Balong Gabus
14. Desa Kendal Pecabean
15. Desa Balong Dowo
16. Desa Kali Pecabean
17. Desa Kedung Peluk
18. Desa Wedoro Klurak
19. Desa Klurak
20. Desa Kebon Sari
21. Desa Durng Bedug
22. Desa Sidodadi
23. Desa Jambangan
24. Desa Durung Banjar

B. Profil dan Struktur KUA Kecamatan Candi

a. Letak Geografis KUA Kecamatan Candi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi adalah salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Sidoarjo. Pada awalnya KUA Kecamatan Candi menempati kantor Kecamatan Candi di jalan H. Noor No. 1 Sidoarjo, dengan status tanah dan bangunannya masih milik pemerintah Kecamatan Candi, seiring dengan bertambahnya arsip dan volume pekerjaannya di KUA Candi, Pada tahun

1978, KUA Candi mendapat sebidang tanah untuk mendirikan KUA Candi seluas 180 meter di Jalan Balai Desa No. 1 Candi untuk ditempati.

b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Candi

KUA merupakan Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan, lembaga ini diselenggarakan di setiap Kecamatan di Indonesia. Peran utama KUA adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Dalam hal ini pihak KUA telah berusaha semaksimal mungkin agar seluruh di wilayah Kecamatan atau wilayah kerja KUA dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan Undang-undang.¹¹¹

Struktur Organisasi KUA, terdiri dari Kepala KUA, Sekertaris dan Anggota yang sebagian juga merangkap sebagai PPN, dan P3N.¹¹² dibawah ini bagan struktur KUA Candi:

c. Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Di Kecamatan Candi

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasal 4 Ayat (3) bahwa diangkatnya pembantu pegawai pencatat nikah sangat penting sekali dalam rangka pelayanan pernikahan

dalam masyarakat, dalam satu kecamatan terdapat banyak desa atau kelurahan dan sangat jauh dari kantor KUA, oleh karena itu perlu diangkatnya

¹¹¹ Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, (Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), Hal. 85.

¹¹² Ibid, Hal. 40.

anggota P3N.¹¹³ Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terdapat 24 orang petugas P3N dalam setiap desa di Kecamatan Candi, sebagaimana yang tercantum di Bawah Ini :

No	NAMA	DESA
1	Senawi	Candi
2	Drs.Achmad Wahyudi	Bligo
3	Ir. Anwari	Larangan
4	Syaiful Chabbi	Tenggulunan
5	M. Yunus	Sepande
6	M. Thoib	Sumokali
7	Suliswanto	Karang Tanjung
8	Slamet	Kedungdendo
9	H. Muchlisin	Sugihwaras
10	Heri raharjo	Gelam
11	Ashuri	Sumorame
12	M. Ishaq	Ngampelsari
13	Khamim	Balong Gabus
14	Nusron	Balong Dowo
15	Mulyono	Kendal Pecabean
16	H. Ridlwan	Kali Pecabean

¹¹³ Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pencatat Nikah.

17	Joko Santoso	Kedung Peluk
18	M. Shodiq	Wedoro Klurak
19	Saiman	Klurak
20	Bahrur Roziq	Kebonsari
21	H. Imron Rosyadi	Durung Gedug
22	Sudarmo Cipto	Sidodadi
23	Satumin	Jambangan
24	Saiful Anwar	Durung Banjar

BAB V

ANALISIS TERHADAP PERAN MODIN SEBAGAI P3N DI KUA KECAMATAN CANDI PASCA INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ. II/1 TAHUN 2015

A. Peran Modin sebagai P3N di KUA Kecamatan Candi

1. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Di Indonesia regulasi pencatatan nikah telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia Merdeka, yakni diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan, Nikah Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan Hukum.¹¹⁴

Pelaksanaan Pencatatan perkawinan di Negara Ini belum menjadi publik servis yakni sebagai pelayanan cuma-cuma yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Mungkin dikarenakan keterbatasan pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan biaya sehingga dalam pelaksanaannya belum bisa memberikan pelaksanaan gratis bagi masyarakat.¹¹⁵

Setelah turunnya surat edaran dari kementrian agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi

¹¹⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), hal. 188-189.

¹¹⁵ Yayan Sopyan, *Islam Negara*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011), hal. 138.

maupun hak - hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut.

Sebagian masyarakat terutama calon pengantin di wilayah KUA kecamatan candi belum mengetahui mengenai dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sehingga masih saja mengurus berkas pernikahan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di desa, hal ini dikarenakan karena kurangnya informasi mengenai dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), disamping itu dikarenakan sulitnya mengisi berkas-berkas dan administrasi untuk pendaftaran menikah yang membutuhkan banyak waktu sehingga para calon pengantin memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi dan pendaftaran kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Begitu pentingnya keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam hal keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan sehingga menjadi tradisi di masyarakat ketika hendak melakukan perkawinan melakukan pendaftaran admistrasinya melalui P3N. Karena masih berpengaruhnya keberadaan P3N dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut, sampai sekarang P3N masih melakukan tugasnya meskipun kedudukannya sudah dihapuskan.¹¹⁶

2. Pengurusan Pernikahan dan Peran Modin dalam pengurusan pencatatan pernikahan menurut Masyarakat Kecamatan Candi

¹¹⁶ Muchlisin, *Wawancara* , kecamatan Candi, 19 Desember 2019.

Untuk mengetahui respon masyarakat tentang pengurusan pernikahan dan Peran Modin menurut masyarakat yang berdomisili di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo, penulis telah melakukan wawancara dengan sepuluh pasangan suami-istri setiap bulan yang melakukan prosesi nikah melalui KUA kecamatan Candi di bulan oktober 2019 hingga bulan Februari 2020. Sepuluh pasangan tersebut dipilih secara acak berdasarkan data dari KUA kecamatan Candi.

Sebagai informasi tambahan berikut penulis sertakan data jumlah pernikahan yang diurus oleh KUA kecamatan Candi sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan Februari 2020, baik yang menggunakan jasa perbantuan dari modin dan yang tidak.

NO	BULAN	NIKAH MELALUI MODIN	NIKAH TANPA MODIN	JUMLAH
1	Oktober	145	9	154
2	November	38	4	42
3	Desember	60	7	67
4	Januari	75	3	78
5	Februari	46	4	50

Tabel 1: data pernikahan tahun 2019-2020 KUA Candi

a. Respon tentang Pemahaman Prosedur Pendaftaran Pencatatan Nikah di KUA

Seperti yang telah dikemukakan di atas, penulis telah mewawancarai sepuluh pasangan suami-istri setiap bulan, mulai dari bulan oktober 2019

hingga bulan Februari 2020. Pasangan yang diwawancarai merupakan pasangan yang melaksanakan pernikahan di KUA kecamatan Candi.

Ketika ditanya tentang “prosedur pendaftaran pencatatan nikah di KUA”, sembilan dari sepuluh pasangan menjawab tidak mengetahui prosedur yang dimaksud. Hanya satu pasangan yang mengetahui prosedur pendaftaran tersebut. Artinya, ada dari 10 pasangan, ada 90% yang tidak mengetahui prosedur dan hanya 10% yang mengetahui prosedur.

Hal demikian membuktikan sangat minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pendaftaran pencatatan nikah melalui KUA. Menurut H. Ach. Sirodj Munir, selaku kepala KUA kecamatan Candi hal demikian disebabkan minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat-syarat dan tatacara pendaftaran pencatatan pernikahan melalui KUA kecamatan Candi.¹¹⁷ Jalan keluarnya, calon pengantin biasanya mencari informasi kepada masyarakat yang sudah atau pernah melaksanakan pencatatan pernikahan di KUA kecamatan Candi, sekalipun tidak semua paham prosedur dan syarat tersebut.

Muchlisin, modin desa Sugihwaras, menjelaskan tidak sedikit dari calon pengantin bertanya kepada pembantu pegawai pencatat nikah (Modin) yang berada di wilayah desa masing-masing. Pilihan bertanya kepada Modin adalah karena mereka sangat dekat dan akrab dengan sang modin.

¹¹⁷ H. Ach. Sirodj Munir, *Wawancara*, kecamatan Candi, 09 Desember 2019.

Kebanyakan masyarakat yang awam belum terbiasa berhadapan dengan pegawai KUA.¹¹⁸

Hal berbeda diaungkapkan oleh Yazid, salah satu pasangan siami-istri di wilayah kecamatan Candi yang menggunakan jasa bantuan modin dalam pengurusan pendaftaran pencatatan nikah. Ia menjelaskan penyuluhan perkawinan di Kecamatan Candi sebenarnya sudah dilaksanakan. Hanya saja, masih banyak calon pengantin yang tidak mengikuti penyuluhan. Biasanya disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kesibukan kerja. solusinya para calon pengantin memilih untuk langsung menemui modin guna pengurusan syarat pernikahan dan konsultasi mengenai seluk beluk pernikahan.¹¹⁹

b. Respon tentang Penggunaan Jasa Perbantuan Modin

Seperti yang telah dijelaskan di atas, minimnya sosialisasi dan keterbatasan waktu masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tatacara pendaftaran pencatatan nikah di KUA, menyebabkan minimnya pengetahuan mereka tentang prosedur tersebut. Sementara di sisi lain, mereka telah memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan pernikahan, karena syarat-syarat informal sebagai seorang suami atau istri telah terpenuhi. Hanya saja masih minim tentang pengetahuan format pendaftaran pencatatan nikah di KUA.

¹¹⁸ Muchlisin, *Wawancara*, kecamatan Candi, 19 Desember 2019.

¹¹⁹ Yazid, *Wawancara*, kecamatan Candi, 12 November 2019.

Ketika disuguhkan pertanyaan tentang penggunaan jasa perbantuan modin dalam pengurusan pendaftaran pencatatan nikah, dari sepuluh pasangan, hanya ada dua pasangan yang tidak menggunakan bantuan modin. Sisanya, ada delapan pasangan yang menggunakan jasa modin.

Ada bermacam alasan mengapa lebih memilih jasa perbantuan modin dalam mengurus pendaftaran pencatatan nikah. Sulton misalnya, memilih menggunakan perbantuan modin karena ia tidak memiliki waktu luang mengurus menyiapkan syarat-syarat yang digunakan untuk pendaftaran pencatatan nikah.¹²⁰

Jawaban lain disampaikan oleh Lukman, ia memang sama sekali awam tentang urusan pendaftaran pencatatan pernikahan di KUA. Karenanya, ia lebih memilih meminta bantuan modin untuk mengurus semua yang berkaitan dengan pencatatan nikah dirinya. Lukman tidak mau ambil resiko dengan mempersiapkan sendiri. Ia khawatir yang disiapkan ternyata sia-sia dan justru memperlambat pelaksanaan prosesi pernikahan. Sementara tanggal prosesi telah disepakati oleh keluarganya dan keluarga calonnya.¹²¹

3. Respon masyarakat terhadap kinerja Modin sebagai Pembantu PPN

Dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dijelaskan bahwa diangkatnya pembantu pegawai pencatat nikah sangat penting sekali dalam

¹²⁰ Sulton, *Wawancara*, kecamatan Candi, 11 Januari 2020.

¹²¹ Lukman, *Wawancara*, kecamatan Candi, 15 Januari 2020.

rangka pelayanan pernikahan dalam masyarakat, dalam satu kecamatan terdapat banyak desa atau kelurahan dan sangat jauh dari kantor KUA.¹²²

Tugas Pembantu PPN adalah membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan oleh petugas KUA tersebut, sedangkan P3N hanya mencatat dan mengembalikan Berkas kepada Kantor Urusan Agama. Tugas P3N tidak hanya membantu PPN menikahkan saja akan tetapi setiap kali ada yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daerah tersebut contohnya memandikan jenazah.¹²³

Kaitannya dengan keberadaan Modin, H. Ach. Sirodj Munir menjelaskan bahwa, “Peranan modin sebagai pembantu PPN di kecamatan Candi ini sangat penting disetiap desa-desa untuk membantu peran KUA Candi dalam rangka pemerataan pelayanan, bukan hanya dalam pernikahan saja, Modin juga berperan aktif dalam kegiatan keagamaan di setiap desa”.¹²⁴ Pernyataan ini mengindikasikan adanya pengakuan dari kepala KUA kecamatan Candi tentang peran modin yang sangat penting dalam mendukung pelayanan KUA kepada masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan oleh H. Zainuri, kepala desa Sugihwaras kecamatan Candi. Menurutnya, keberadaan modin sangat penting. Ia mengakui, di desa yang ia pimpin, modin mengurus segala hal yang berkaitan dengan

¹²² Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

¹²³ Kementerian Agama Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam Direktorat Urusan masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, 2010. Hal 12.

¹²⁴ H. Ach. Sirodj Munir, *Wawancara*, kecamatan Candi, 09 Desember 2019.

keagamaan, terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan. Bahkan sampai saat ini pun masyarakat masih meminta tolong modin dalam pengurusan urusan kawin dan rujuk.¹²⁵

B. Peran Modin Sebagai Pembantu PPN di KUA Kecamatan Candi Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015 dalam Pandangan Teori Utility Jeremy Banthem

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat (4) tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pembantu PPN adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu tugas PPN di desa tertentu.

Tugas Pembantu PPN adalah membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan oleh petugas KUA tersebut, sedangkan P3N hanya mencatat dan mengembalikan Berkas kepada Kantor Urusan Agama. Tugas P3N tidak hanya membantu PPN menikahkan saja akan tetapi setiap kali ada yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daerah tersebut contohnya memandikan jenazah.

Di wilayah hukum KUA kecamatan Candi, kedudukan Pembantu PPN ini dijabat oleh seorang modin. Modin yang merupakan tokoh agama setempat memiliki peluang sangat besar untuk paham secara menyeluruh seluk beluk permasalahan keagamaan masyarakat, termasuk urusan nikah dan rujuk. Bahkan pasca dikeluarkannya Surat Instruksi Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang

¹²⁵ H. Zainuri, *Wawancara*, Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, 15 Desember 2019.

Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah, modin masih berperan penting dalam pengurusan nikah dan rujuk.

Hal demikian patut untuk dianggap wajar mengingat masih banyak masyarakat di kecamatan Candi yang tidak bisa mengurus pendaftaran pencatatan nikah secara langsung di KUA kecamatan Candi. Hal demikian dipengaruhi oleh kealpaan pengetahuan calon pengantin ataupun kealpaan waktu diakibatkan kesibukan kerja. Dengan adanya bantuan modin, dua faktor alasan penghambat pendaftaran pencatatan nikah tersebut bisa teratasi.

Masyarakat di kecamatan Candi, khususnya calon pengantin, merasa sangat senang dan terbantu oleh keberadaan modin yang berperan membantu pendaftaran pencatatan nikah. Hal demikian senada dengan apa yang dinyatakan oleh Jeremy Banthem, bahwa basis moralitas hukum adalah kesenangan masyarakat. apa yang membuat senang masyarakat, itulah yang seharusnya diperjuangkan.

Bagi Bentham, boleh jadi masyarakat melakukan sesuatu yang menyenangkan dalam rangka mendapatkan sesuatu lain yang menyenangkan juga, maka kesenangan memiliki dua nilai yaitu intrinsik dan instrumental. Masyarakat akan merasa bahagia bila dua jenis kebahagiaan bisa tercapai secara bersamaan. *Pertama*; kebahagiaan instrinsik berupa terciptanya keluarga yang harmonis dan memiliki kekuatan hukum di mata negara. *Kedua*, kebahagiaan instrumental berupa kemudahan mengurus pendaftaran pencatatan pernikahan di KUA, yang secara tidak langsung juga menjadi perantara untuk menggapai kebahagiaan instrinsik. Artinya, keberadaan modin merupakan kebahagiaan

instrumental yang memudahkan seseorang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan memiliki kekuatan hukum.

Kendala-kendala dalam pendaftaran pencatatan nikah sangat mengganggu dan bisa menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menggapai kebahagiaan yang terdapat di dalam pernikahan. Keharmonisan yang tercipta dalam sebuah pernikahan tidak akan sempurna bila pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA karena tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Hal ini seperti ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian ditegaskan juga dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Keinginan seorang calon pengantin untuk mendapat kemudahan pengurusan pencatatan pernikahan dan keluarga yang harmonis serta memiliki kekuatan hukum merupakan keinginan yang lumrah terjadi. Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidak senangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup.

Berdasar pada ketercapaian kebahagiaan ini, keberadaan modin harusnya bisa dikaji lebih dalam lagi. Berdasar pada pengakuan beberapa warga masyarakat dan pejabat berwenang di lingkungan KUA kecamatan Candi, keberadaan modin sangat membantu dalam pengurusan pendaftaran pencatatan nikah. Keberadaan

modin bisa mewujudkan “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).

Dalam konteks pernikahan, kebahagiaan terbesar adalah kemudahan untuk menuju keluarga yang harmonis dan memiliki kekuatan hukum. Kebahagiaan semacam ini salah satunya bisa diwujudkan dengan adanya modin. Selain itu, kebahagiaan ini bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, melainkan oleh banyak orang. Keberadaan modin akan membuat warga satu desa atau kelurahan merasa bahagia, karena pengurusan pendaftaran pencatatan nikah bisa dilaksanakan dengan mudah dan tanpa kendala yang berarti.

Di samping itu, bagi Bentham ada empat aspek yang bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat kebahagiaan yang ditimbulkan;

Pertama; aspek intensitas dan lamanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang ditimbulkan karena adanya peran modin merupakan kebahagiaan yang bisa dirasakan setiap saat dan dalam jangka waktu yang lama. Hal demikian bila merujuk pada tujuan pernikahan yang disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sifat kekal inilah yang menjadikan durasi kebahagiaan pernikahan menjadi sangat lama dan akan dirasakan setiap saat.

Kedua, aspek kepastian dan kedekatan pada kebahagiaan. Peran modin sebagai pembantu PPN sangat membantu calon pengantin dalam urusan pendaftaran pencatatan nikah. Di KUA kecamatan Candi, dari 10 pasangan, hanya 1 pasangan yang memahami prosedur pendaftaran pencatatan nikah di KUA.

Sembilan pasangan lainnya tidak memahaminya. Dengan bantuan modin, sembilan pasangan itu merasa sangat terbantuan dalam pendaftaran pencatatan nikah, sekalipun yang bersangkutan tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur. Dan pada kasus yang lain, dari 10 pasangan, hanya ada 2 pasangan yang tidak menggunakan perbantuan modin. Delapan pasangan lainnya menggunakan perbantuan modin. Artinya, lebih banyak pasangan menggantungkan urusan pendaftaran pencatatan nikah pada modin dari pada yang tidak.

Ketiga, aspek kesuburan dan kemurniannya. Keberadaan modi sebagai pembantu PPN akan menghantarkan pada kebahagiaan instriksik, berupa keluarga harmonis yang memiliki kekuatan hukum. Melalui bantuan modin, peluang untuk menciptakan keluarga yang memiliki kekuatan hukum sangat besar, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki pemahaman prosedur pendaftaran pencatatan nikah atau pasangan yang tidak memiliki waktu luang untuk mengurusnya. Selain itu, keberadaan modin sebagai pembantu PPN *ansich* memberikan manfaat, baik bagi calon pengantin berupa kelancaran pendaftaran maupun bagi pihak KUA berupa tertib administrasi. Semua nara sumber tidak menyebutkan dampak buruk modin sebagai pembantu PPN.

Keempat, aspek jangkauan perasaan bahagia. Manfaat dari peran modin sebagai pembantu PPN tidak hanya dirasakan oleh calon pengantin saja, melainkan oleh berbagai pihak. *Pertama*; pihak KUA yang merasa terbantuan untuk melakukan melakukan penelusuran identitas para calon pengantin, karena modin sangat erat dengan kehidupan masyarakat. *kedua*; kepala desa yang juga

merasa terbantukan, setidaknya pernikahan yang dilangsungkan oleh warganya memiliki kekuatan hukum. Sehingga tidak ada warganya yang tidak memiliki peluang untuk tidak mendapatkan perlindungan hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti dalam uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peranan modin sebagai pembantu PPN di kecamatan Candi ini sangat penting disetiap desa-desa untuk membantu peran KUA Candi dalam rangka pemerataan pelayanan, bukan hanya dalam pernikahan saja, Modin juga berperan aktif dalam kegiatan keagamaan di setiap desa. Minimnya pengetahuan calon pengantin tentang pendaftaran penatatan pernikahan atau minimnya waktu luang untuk mengurus pendaftaran secara langsung menjadikan para calon pengantin meminta bantuan modin untuk mengurusnya. Pilihan bertanya kepada Modin adalah karena mereka sangat dekat dan akrab dengan sang modin. Kebanyakan masyarakat yang awam belum terbiasa berhadapan dengan pegawai KUA.
2. Dengan adanya peran modin sebagai pembantu PPN, setidaknya masyarakat merasakan dua jenis kebahagiaan bisa tercapai secara bersamaan. *Pertama*; kebahagiaan instrinsik berupa terciptanya keluarga yang harmonis dan memiliki kekuatan hukum di mata negara. *Kedua*, kebahagiaan instrumental berupa kemudahan mengurus pendaftaran pencatatan pernikahan di KUA, yang secara tidak langsung juga menjadi perantara untuk menggapai kebahagiaan instrinsik. Artinya, keberadaan modin merupakan kebahagiaan

instrumental yang memudahkan seseorang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan memiliki kekuatan hukum.

B. Saran

Fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya calon pengantin yang tidak memahami prosedur pendaftaran pencatatan nikah atau karena minimnya waktu luang untuk mengurusnya. Sehingga mereka meminta bantuan modin untuk mengurus pendaftaran tersebut. Bahkan hingga saat ini, pasca adanya Surat Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah, masyarakat masih tetap meminta bantuan modin untuk setiap urusan keagamaan, khususnya pernikahan.

Sementara, pelaksanaan pencatatan pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara agar peristiwa hukum berupa pernikahan mendapatkan status berkekuatan hukum di hadapan negara. Untuk itu, setidaknya pemerintah, dalam hal ini kementrian agama, meninjau kembali surat instruksi di atas, sehingga modin tetap bisa bertugas sebagai Pembantu PPN dengan tanpa membedakan jenis tipologi KUA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Karya Tulis

- Ahmadi, Ali. Tesis, *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) semarang 2015.*
- Anhari, Masjkur. *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, Surabaya: Diantama, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 2012.
- George Ritzeer, Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Grathoff, Richard. *Kesesuaian Antara Alfreed Schutzdan Talcot Parsons: Teori Aksi Sosisal*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Hamilton, Peter. *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Hamilton, Peter. *Talcott Parsons dan pemikirannya:Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Intruksi Direktorat Jenderal Masyarakat Islam No DJ II/I Tahun 2015.
- Ismail, *Potret Kinerja dan Pelayanan Publik Oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)di Kabupaten Tangerang: Kasus KUA Kecamatan Cikupa, Curug, Teluk Naga, dan Kosambi*, Jurnal Penamas Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015.
- Kementrian Agama Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam Direktorat Urusan masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah Kementrian Agama, 2010.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad Zaid dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam yang Kontroversial)*, Jakarta: Graha Cipta, 2005, Cet 1.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Ilmiah* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 2.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 3 ayat 1.
- Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 *Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Pasal 1 Ayat (4).
- Raho,SVD, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/113 Tahun 2009 *Penggunaan Dana penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.
- Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.
- Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.
- Syaifudin, Ahmad. Tesis, *Pelaksanaan Tugas Pegawai pencatat nikah dan Pembantu Pegawai pencatat Nikah Menurut keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah (Studi di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Tahir Hamid, Andi *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangny*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI PRESS, 1986.

B. Sumber Wawancara

H. Ach. Sirodj Munir, *Wawancara* , kecamatan Candi, 09 Desember 2019.

H. Zainuri, *Wawancara*, Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, 15 Desember 2019.

Lukman, *Wawancara*, kecamatan Candi, 15 Januari 2020.

Muchlisin, *Wawancara* , kecamatan Candi, 19 Desember 2019.

Sulton, *Wawancara*, kecamatan Candi, 11 Januari 2020.

Yazid, *Wawancara*, kecamatan Candi, 12 November 2019.